



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



STRATEGI KEPEMILIKAN RUMAH BAGI PNPP POLDA KALTENG

Oleh:

Zainuddin, S.Pd., SE., M.Si.

NO SIS: 20240707012303

PKN II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

ABSTRAK

Proyek Perubahan "strategi Kepemilikan rumah bagi PNPP Polda Kalimantan Tengah" dengan tujuan terpenuhinya perumahan bagi PNPP bertujuan untuk berperan penting dan strategis dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian dimanapun mereka bertugas dalam menjamin profesionalitas kerja dan giat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial di Masyarakat. sehingga akan menjadi acuan ke stakeholder terkait guna dijadikan pertumbuhan penyediaan Perumahan bagi PNPP. Hasil implemetasi pada setiap tahapan yang telah terlaksana dalam jangka pendek dengan Terlaksananya Pembuatan Surat Perintah tentang penunjukan Tim Efektif Proyek Perubahan, Terbentuknya Struktur Tim Efektif Proyek Perubahan, Sosialisasi Metode kerja kepada personel / tim kerja, Koordinasi dan Komunikasi dengan stakeholder dalam penyusunan Draf PKS, Menyajikan Draf PKS yang sudah disepakati oleh Stakeholder dan Melaksanakan Survey dan Mendata PNPP yang berminat untuk memiliki rumah serta Melaksanakan Survey perumahan yang akan dibangun oleh Developer atau Pengemban. Tersusunnya surat undangan dengan maksud dan tujuan kepada stakeholder tentang proyek perubahan. Terlaksananya Sosialisasi terhadap PNPP Polda Kalteng serta terwujudnya hasil evaluasi dan pelaporan tentang pembentukan Tim Efektif sampai dengan proses Koordinasi dan Kolaborasi dengan stakeholder yang ada dan sosialisasi ke Polda jajaran. Sedangkan hasil implementasi untuk jangka menengah telah Terlaksananya sosialisasi dan sinergisitas dengan stakeholder untuk pelaksanaan meningkatkan Kepemilikan rumah bagi PNPP Polda Kalteng sesuai dengan harapan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga saya dapat menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan yang berjudul: “**STRATEGI KEPEMILIKAN RUMAH BAGI PNPP POLDA KALIMANTAN TENGAH**”, Terima kasih kepada Karo SDM Polda Kalteng, Kombes Pol. Leo S. N Simatupang, S.I.K, selaku *Mentor*. Terima kasih kepada Burdan Ali Junjuran, SH., M.Si. selaku *Coach* yang telah membimbing dan menuntun dalam pengerjaan proyek perubahan ini, terima kasih kepada Tim Efektif dan seluruh *Stakeholder* yang terlibat dalam proyek perubahan ini. Saya juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada segenap Pimpinan, Pengajar, dan Widyaiswara pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional II. Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada seluruh rekan-rekan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Angkatan XXXI Pusdikmin Polri Tahun 2024 Angkatan XXXI yang datang dari seluruh Polda dan Instansi Pemerintah di Indonesia. Laporan implementasi proyek perubahan ini adalah hasil dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagai bentuk kinerja dalam merancang suatu perubahan pada unit kerja dan memimpin perubahan untuk dapat memberikan hasil yang signifikan. Akhir kata, besar harapan saya bahwa hasil dari implementasi proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi Instansi Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalteng dalam Kepemilikan rumah bagi PNPP Polda dan Polres Jajaran Polda Kalteng.

Palangkaraya, November 2024

Penulis

AKBP ZAINUDDIN, S.Pd., S.E., M.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	2
ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. INOVASI DAN OUTPUT PERUBAHAN	28
C. RUANG LINGKUP	32
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	36
A. ROADMAP MILESTONES PROYEK PERUBAHAN	36
B. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN	39
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	45
A. CAPAIAN TAHAPAN STRATEGIS	45
B. IMPLEMENTASI	85
C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI	86
BAB IV PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. REKOMENDASI	90
C. LESSON LEARNT	90
D. LAMPIRAN – LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

1. TABEL 1. DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG 2021	20
2. TABEL 2. DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG 2022	21
3. TABEL 3. DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG 2023	21
4. TABEL 4. KEPEMILIKAN RUMAH PNPP POLDA KALTENG BERDASARKAN KEPANGKATAN	22
5. TABEL 5. PNPP YANG BERMINAT MEMILIKI RUMAH POLRES JAJARAN DAN POLDA KALTENG 2024	22
6. TABEL 6. URAIAN TIM EFEKTIF	35
7. TABEL 7. MILESTONE JANGKA PENDEK.....	38
8. TABEL 8. MILES JANGKA MENENGAH.....	38
9. TABEL 9. MILESTONE JANGKA PANJANG	39
10. TABEL 10. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN.....	47
11. TABEL 11. GAMBARAN PERUBAHAN SEBELUM DAN SESUDAH PROYEK PERUBAHAN	86

DAFTAR GAMBAR

1. GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO SDM POLDA TIPE A.....	18
2. GAMBAR 2. MEKANISME PENGAJUAN KREDIT	23
3. GAMBAR 3. STRUKTUR TIM PENYUSUN PROYEK PERUBAHAN	32
4. GAMBAR 4. PETA STAKEHOLDER.....	41
5. GAMBAR 5. PENGARAHAN MENTOR TERHADAP TIM EFEKTIF	48
6. GAMBAR 6. PENGARAHAN DAN PENANDATANGANAN SPRIN GIAT PROPER	48
7. GAMBAR 7. SPRINT PELAKSANAAN TUGAS TIM EFEKTIF.....	49
8. GAMBAR 8. SPRINT DAFTAR HADIR DAN NOTULEN TUGAS TIM EFEKTIF.....	49
9. GAMBAR 9. RAPAT DAN METODE KERJA TIM EFEKTIF	50
10. GAMBAR 10. ST PERMINTAAN DATA KEPEMILIKAN RUMAH SELURUH PNPP	51
11. GAMBAR 11. DATA KEPEMILIKAN RUMAH PNPP	52
12. GAMBAR 12. KOORDINASI DAN KOLABORASI DGN PIM. PT. KELVIN BERKAH MANDIRI	54
13. GAMBAR 13. KOORDINASI DENGAN PENGEMBANG	54
14. GAMBAR 14. KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN PIM PT. KAYU MANIS	55
15. GAMBAR 15. KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN PENGEMBANG.....	55
16. GAMBAR 16. KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN PIMCAB PT. ASABRI.....	56
17. GAMBAR 17. KOORDINASI DAN KOLABORASI PT. ASABRI	56
18. GAMBAR 18. KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN BANK BRI CAB. PALANGKARAYA	57
19. GAMBAR 19. SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DENGAN BANK BRI CAB PALANGKARAYA.....	57
20. GAMBAR 20. KOORDINASI DAN KOLABORASI DGN BANK BTN CAB. PALANGKARAYA.....	58

21. GAMBAR 21. SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DENGAN BANK BTN CAB. PALANGKARAYA	58
22. GAMBAR 22. SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA KALTENG	60
23. GAMBAR 23. SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP	60
24. GAMBAR 24. ST SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLDA KALTENG.....	62
25. GAMBAR 25. SPRINT MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLDA KALTENG	62
26. GAMBAR 26. SPRINT PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP	63
27. GAMBAR 27. PELAKSANAAN SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA KALTENG DAN JAJARAN POLRES POLDA KALTENG	63
28. GAMBAR 28. DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA KALTENG DAN JAJARAN POLRES POLDA KALTENG.....	64
29. GAMBAR 29. PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM 1 / RAYON I (POLRES KOTIM, POLRES KATINGAN DAN POLRES SERUYAN).....	64
30. GAMBAR 30. PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM II / III RAYON 2 DAN 3 (POLRES BARTIM, BARSEL, BARUT, MURA DAN GUMAS).....	65
31. GAMBAR 31. DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI PERUMAHAN	65
32. GAMBAR 32. PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM IV RAYON 4	66
33. GAMBAR 33. DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI PERUMAHAN	66
34. GAMBAR 34. PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM V RAYON	67
35. GAMBAR 35. DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI PERUMAHAN	67

36. GAMBAR 36. RAPAT DENGAN MENTOR DAN TIM EFEKTIF DALAM MENYUSUN DRAF PKS PERUMAHAN	69
37. GAMBAR 37. SURVEY LOKASI PERUMAHAN YANG AKAN DIBANGUN OLEH PARA PENGEMBANG/DEVELOPER	71
38. GAMBAR 38. LOKASI PERUMAHAN YANG AKAN DIBANGUN OLEH PARA PENGEMBANG / DEVELOPER	71
39. GAMBAR 39. NOTA DINAS SINGKRONISASI DRAF PKS DENGAN SATKER TERKAIT	72
40. GAMBAR 40. SINGKRONISASI DENGAN SATKER TERKAIT PKS PERUMAHAN	73
41. GAMBAR 41. DRAF PKS PERUMAHAN	73
42. GAMBAR 42 DAFTAR HADIR DAN NOTULEN SINGKRONISASI DENGAN STAFF BAG KERMA RO OPS, BIDKUM DAN SETUM POLDA KALTENG	74
43. GAMBAR 43. SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DENGAN PUPR PROV. KALTENG	75
44. GAMBAR 44. MELAKSANAKAN BREAND MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN PUPR.....	76
45. GAMBAR 45. MELAKSANAKAN BREAND MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN PUPR PROV. KALTENG	76
46. GAMBAR 46. SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DENGAN KOREM 102/PANJU PANJUNG KALTENG	78
47. GAMBAR 47. MELAKSANAKAN BREAND MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN KOREM 102 / PANJU PANJUNG KALTENG	78
48. GAMBAR 48. MELAKSANAKAN BREAND MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN KOREM 102 PANJU PANJUNG KALTENG	79
49. GAMBAR 49. SURAT PEMBERITAHUAN SINGKRONISASI DRAF PKS DENGAN STAKEHOLDER	80
50. GAMBAR 50. SINGKRONISASI DENGAN STAKEHOLDER TENTANG DRAF PKS PERUMAHAN	81

51. GAMBAR 51. DUKUNGAN KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH DALAM PROYEK PERUMAHAN YANG TELAH DIBUAT	82
52. GAMBAR 52. DUKUNGAN KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH DALAM PROYEK PERUMAHAN YANG TELAH DIBUAT	82
53. GAMBAR 53. PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN KARO SDM POLDA KALIMANTAN TENGAH.....	83
54. GAMBAR 54. PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. KELVIN BERKAH MANDIRI PALANGKARAYA.....	83
55. GAMBAR 55. PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR CABANG PALANGKARAYA	84
56. GAMBAR 56. PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) PALANGKARAYA	84
57. GAMBAR 57. PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. GRAHA ASRAWI MEMBANGUN (Persero) PALANGKARAYA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia selain sandang dan pangan dimana setiap individu manusia akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer atau dasar dari pada kebutuhan sekundernya, begitu pula dengan kebutuhan akan rumah dimana setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang ada.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman termasuk bagi pegawai negeri pada Polri.

Kebijakan program pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan program prioritas Kapolri 100.000 rumah yang bekerjasama dengan para pengembang perumahan (developer), lembaga keuangan (Bank). Pembangunan perumahan yang dikembangkan adalah tipe 36 di peruntukkan bagi kelompok sasaran masyarakat atau PNPP yang penghasilan tetap atau tidak tetap yang berpenghasilan rendah. Peran pemerintah dan mekanisme program dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat dan PNPP diatur berdasarkan Peraturan

Menteri diantaranya pemberian kemudahan perizinan, penyediaan fasilitas, sarana prasarana, perintisan atau penyediaan bank tanah, penetapan zonasi untuk rumah sejahtera dan mekanisme pembiayaan.

Pengadaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah termasuk PNPP sesungguhnya telah lama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 11 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh perumahan dinas/asrama/mess;
2. Bagi anggota Polri yang belum memperoleh rumah dinas, asrama, atau mess dapat diberikan kompensasi sewa rumah sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
3. Mengingat terbatasnya PP Nomor 42 Tahun 2010 yang mengatur tentang hak-hak kepemilikan rumah murah dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya bagi PNPP, maka dengan memanfaatkan momen Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), ada ruang bagi anggota dan PNS Polri untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah murah dan layak huni sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam peningkatan kesejahteraan bagi pegawainya, khususnya pegawai PNPP.

Upaya dalam meningkatkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional harus ditunjang dengan tingkat kesejahteraan utamanya masalah perumahan yang harus dimiliki sehingga dapat focus pada pekerjaan yang di jalankan.

Permasalahan lainnya yang ditemukan penulis, masih banyaknya personel yang belum memiliki rumah, dari Data tahun 2021 sampai dengan 2023 masih sekitar 62,75 % yang sudah memiliki rumah dan 38,25 % yang belum memiliki rumah dari jumlah PNPP 8275 personel dari DSP 16.889 yang ada, dikarenakan

seringnya berpindah-pindah dalam tugas sehingga lupa untuk memiliki rumah secara pribadi, selain itu juga masih banyak yang hidup bersandar dengan kedua orang tua, belum adanya sikap dan rencana untuk memiliki rumah secara pribadi karena masih tinggal di rumah Dinas, disamping itu juga personel yang baru lulus menjadi anggota Polri banyak yang mengajukan pinjaman ke Bank hanya untuk membeli fasilitas pribadi seperti roda empat dan roda dua, pemahaman soal PUM ASABRI yang dapat digunakan untuk uang muka dalam pengambilan KPR FLPP bersubsidi maupun KPR non subsidi bagi PNPP masih belum merata pemahamannya dan belum ada mekanisme notifikasi bagi mereka yang menerima.

Kondisi tersebut mendorong Penulis untuk melakukan perubahan yang juga sebagai terobosan terhadap penerapan Nawacita Presiden sejuta Rumah dan 16 Program Prioritas Kapolri pada Program Kapolri untuk pemenuhan perumahan kepada PNPP dengan target 100.000 rumah, ini menunjukkan bahwa tekad Kapolri untuk memenuhi kesejahteraan anggota/PNPP melalui perumahan harus mendapatkan atensi dari semua Kasatker dari seluruh jajaran Polri.

Selain itu, saat ini juga terdapat skema pembiayaan perumahan yang dijalankan pemerintah bagi masyarakat yaitu Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank, Pembiayaan melalui PT SMF (Sarana Multi Finance) dan KPR bersubsidi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Presiden selaku pimpinan program penyediaan rumah bagi ASN dan Prajurit TNI/Polri, telah menugaskan beberapa Menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan perumahan yang paling tepat bagi PNPP.

Namun demikian, permintaan atas perumahan layak huni untuk PNPP masih sangat tinggi, oleh sebab itu hal yang wajar bila pimpinan Polri memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan rumah huni yang layak bagi PNPP. Dengan perumahan pribadi bagi PNPP sangat penting dan strategis untuk mendukung tugas-tugas kepolisian dimanapun dalam bertugas sehingga menjamin profesionalitas kerja dan giat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

1.1 Gambaran Umum Biro SDM

Sebagai aparatur negara dan abdi negara yang memiliki tugas pokok fungsi dan peran sebagai alat Negara, Tri Brata menjadi pedoman hidup Polri melalui sebuah penelitian yang panjang selama satu dasa warsa setelah Republik Indonesia di proklamirkan. Tri Brata diresmikan sebagai kode etik pelaksanaan tugas Polri pada tanggal 1 Juli 1955, dimana kami polisi Indonesia:

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan dan terhadap Tuhan YME
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keiklasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban

Selain pedoman hidup Tri Brata, Polri juga memiliki pedoman kerja yang disebut Catur Prasetya sejak 1961, sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan Negara untuk :

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Tugas, dan Fungsi:

Biro SDM

Bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel, serta penilaian kompetensi di lingkungan Polda.

Dalam melaksanakan tugas, Ro SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

- b. perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian;
- c. pembinaan manajemen personel yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel, serta pembinaan PNS Polri;
- d. pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan; dan
- e. pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel.

Bagian Organisasi Biro Operasional

1. Subbagrenmin

Bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ro SDM.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA/K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;

- b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
- c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

2. Bagdalpers,

Bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen pengendalian personel yang meliputi penyediaan, seleksi dan pembinaan PNS Polri.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagdalpers menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan seleksi penerimaan Pendidikan pembentukan Tamtama, Bintara, PNS Polri, dan Perwira meliputi Akademi Kepolisian (Akp) dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), dan Sekolah Inspektur Polisi (SIP);
- b. penyelenggaraan kegiatan seleksi penerimaan Pendidikan pengembangan, antara lain pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma), Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), serta pendaftaran Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti),
- c. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), dan Diklatpim Tk I, II, III dan IV;
- d. pelaksanaan seleksi dan penerimaan Pendidikan Alih Golongan (PAG); dan
- e. pelayanan kegiatan proses administrasi penerimaan, Pendidikan dan pelatihan PNS Polri.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagdalpers dibantu oleh:

- a. Subbagdiapers, bertugas melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan pegawai negeri pada Polri;
- b. Subbagselek, bertugas melaksanakan kegiatan seleksi dan pendaftaran pendidikan pengembangan Polri; dan
- c. Subbag PNS, bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pendidikan dan latihan PNS Polri.

3. **Bagbinkar** bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi kepangkatan, pelaksanaan asesmen, mutasi serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagbinkar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) untuk anggota Polri dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) untuk PNS Polri, serta penyempuhan pangkat PAG;
- b. pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
- c. pembinaan dan pengembangan kompetensi personel; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagbinkar dibantu oleh:

- a. Subbagpangkat, bertugas menyelenggarakan UKP bagi pegawai negeri pada Polri serta penyempuhan pangkat PAG; dan
 - b. Subbagmutjab, bertugas menyelenggarakan asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel.
 - c. Subbagkompeten, bertugas menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri.
4. **Bagwatpers** bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan rohani, jasmani, pemberian tanda kehormatan, administrasi pengakhiran dinas, pemberhentian dan pengaktifan kembali, penyaluran bagi Pegawai Negeri pada Polri serta membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri.

Dalam melaksanakan tugas, Bagwatpers menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan rohani, jasmani, dan mengusulkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan Pegawai Negeri pada Polri;

- b. penyelenggaraan administrasi pengakhiran, pemberhentian pengaktifan kembali, dan penyaluran bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
- c. pengembangan museum dan kesejarahan Polri.

Dalam melaksanakan tugas, Bagwatpers dibantu oleh:

- a. Subbagrohjashor, bertugas menyelenggarakan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala, pembinaan keluarga, dan mengusulkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan, serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri; dan
- b. Subbagkirdinlur, bertugas menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta penyaluran bagi personel Polri.

5. **Bagpsi** bertugas membina dan melaksanakan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel.

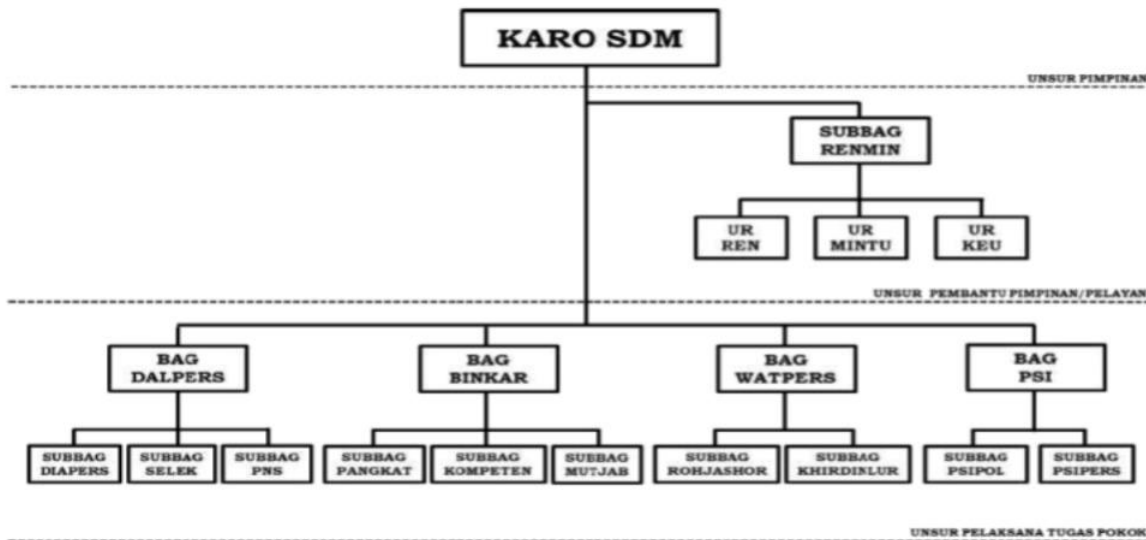
Dalam melaksanakan tugas, Bagpsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan psikologi kepolisian; dan
- b. pembinaan dan pelaksanaan psikologi personel;

Dalam melaksanakan tugas, Bagpsi dibantu oleh:

- a. Subbagpsipol, bertugas menyelenggarakan psikologi kepolisian; dan
- b. Subbagpsipers, bertugas menyelenggarakan psikologi personel.

Mengacu terhadap peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian daerah :



Sumber: Perpol No.14 tahun 2018

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI BIRO SDM POLDA TIPE A

a. Kondisi saat ini.

Dari hasil pengolahan data Sebagian besar PNPP yang telah memiliki rumah, ini terlihat dari data tahun 2023 yang jumlah anggota / PNPP 8275 orang PNPP yang menunjukkan bahwa 64,31 % atau 5322 orang PNPP tinggal dirumah milik sendiri dalam setahun terakhir. Sisanya tersebar tidak merata dalam bentuk tinggal dirumah sewa atau kontrakan (4,21%), rumah dinas/asrama (21,16%), indeksos (4,33%) dan tinggal dirumah orang tua (5,99 %). Polda Kalimantan Tengah / Satker Polda tampak mendominasi kepemilikan rumah pribadi dari 14 Polres yang di survey. Pemukiman dan perumahan yang dihadapi semakin konflik, tingginya Tingkat kelahiran dan migrasi penduduk dari daerah atau pulau lain yang menambah jumlah jiwa penduduk di Kalimantan Tengah. Bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota, industri dan kawasan pendidikan serta perguruan tinggi.

Harga tanah yang semakin tinggi, ini memacu pergerakan harga rumah ikut naik dan menjadi mahal membuat masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan menengah kebawah, mengalami kesulitan untuk mendapatkan harga rumah atau harga tanah yang layak dan ideal. Kredit kepemilikan rumah pun menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi mereka.

Alternatif pembangunan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi di atas yaitu Pembangunan-pembangunan perumahan di daerah pinggiran kota. Pembangunan pengembangan perumahan ini merupakan konsekuensi logis di kota besar terutama di kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Di kota besar terlihat bahwa keterbatasan lahan bagi permukiman semakin terbatas, serta aturan dalam pengajuan kredit dari PNPP kepada pihak perbankan dan pinjaman ini untuk membeli kendaraan roda dua, roda empat juga untuk membeli alat-alat kebutuhan rumah tangga termasuk telepon genggam dan kebutuhan kendaraan lainnya.

Kendala lain yang juga tidak boleh dilupakan adalah mekanisme pengajuan yang cukup membutuhkan waktu yang lama Dimana Skep Kelulusan yang sebagai dasar untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan istilah Skep di sekolahkan adalah ungkapan umum yang telah diketahui luas untuk menjelaskan Tindakan PNPP mengagungkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNPP untuk memperoleh kredit. Ungkapan ini diperlebar dengan SKEP ga lulus-lulus untuk memaknai SKEP yang terus menerus diangungkan Ketika satu pinjaman lunas untuk masuk kepinjaman berikutnya. Selain itu, top-up pinjaman menggambarkan penambahan nilai pinjaman yang ada (existing) dengan rujukan SKEP yang Tengah dijaminan. Hingga derajat tertentu, keberadaan pinjaman lain ini dapat mempengaruhi profil PNPP di mata Lembaga pembiayaan dalam mengakses kredit perumahan. keterbatasan kemampuan ekonomi anggota/PNPP dan masyarakat. Sehingga pemukiman penduduk bergeser ke daerah pinggiran Kota atau Kabupaten sekitar.

Kita sangat menyadari bahwa rumah adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan, baik secara individu maupun untuk kepentingan pengembangan daerah, karena adanya pembangunan perumahan yang terencana, maka setidaknya-tidaknya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan dan penataan daerah sehingga daerah tersebut dapat terwujud sebagai daerah yang bebas dari pemukiman kumuh dan bahaya banjir serta ikut peran dalam membantu masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang ideal serta aman dan nyaman. Sebagian besar PNPP memiliki rumah sendiri, ini berarti tantangan pembangunan 100.000 rumah sudah selesai, jika angka 38,25% persen

yang tersisa, yakni yang belum memiliki rumah, di konfersi kedalam total populasi PNPP yang sesungguhnya, maka sedikitnya masih ada PNPP yang belum memiliki rumah. Ini jelas tantangan yang tidak sedikit.

DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG TAHUN 2021

NO	SATKER/SATWIL	JUMLAH ANGGOTA/PNS	STATUS RUMAH				
			MILIK SENDIRI	DINAS/ ASRAMA	KONTRAK/ SEWA/KOST	MILIK ORANGTUA	KET.
1	POLDA KALTENG	2726	1630	717	210	148	
2	RES P. RAYA	436	371	38	8	19	
3	RES KAPUAS	506	436	48	1	21	
4	RES BARSEL	268	157	72	3	36	
5	RES BARTIM	253	196	29	13	15	
6	RES BARUT	281	196	78	0	7	
7	RES MURA	254	140	43	54	17	
8	RES KOTIM	525	416	57	2	50	
9	RES KOBAR	388	298	69	10	11	
10	RES SERUYAN	242	88	74	60	20	
11	RES KATINGAN	296	174	80	21	21	
12	RES PULPIS	305	137	88	22	58	
13	RES GUMAS	249	122	88	23	16	
14	RES LAMANDAU	242	202	15	22	3	
15	RES SUKAMARA	254	147	37	52	18	
JUMLAH		7225	4710	1533	501	460	
			65,19%	21,21%	6,93%	6,36%	

TABEL 1. DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG 2021

DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG TAHUN 2022

NO	SATKER/SATWIL	JUMLAH ANGGOTA/PNS	STATUS RUMAH					KET.
			MILIK SENDIRI	DINAS/ASRAMA	KONTRAK / SEWA	KOST	MILIK ORANGTUA	
1	POLDA KALTENG	2960	1889	822	37	80	132	2960
2	RESTA P. RAYA	453	395	31	2	0	25	453
3	RES KAPUAS	515	448	66	1	0	0	515
4	RES BARSEL	289	158	89	4	0	38	289
5	RES BARTIM	279	188	73	11	0	7	279
6	RES BARUT	306	152	132	0	10	12	306
7	RES MURA	276	140	11	40	42	43	276
8	RES KOTIM	540	434	105	0	1	0	540
9	RES KOBAR	390	351	27	0	0	12	390
10	RES SERUYAN	271	173	58	18	3	19	271
11	RES KATINGAN	323	158	108	9	12	36	323
12	RES PULPIS	324	146	98	0	22	58	324
13	RES GUMAS	275	108	60	12	90	5	275
14	RES LAMANDAU	265	174	75	1	9	6	265
15	RES SUKAMARA	269	188	12	61	0	8	269
JUMLAH		7735	5102	1767	196	269	401	
			65,96	22,84	2,53	3,48	5,18	

TABEL 2. DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG 2022

DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG TAHUN 2023

NO	SATKER/SATWIL	JUMLAH ANGGOTA/PNS	STATUS RUMAH					KET.
			MILIK SENDIRI	DINAS/ASRAMA	KONTRAK / SEWA	KOST	MILIK ORANGTUA	
1	POLDA KALTENG	3414	2114	822	112	134	232	3414
2	RESTA P. RAYA	471	407	31	2	6	25	471
3	RES KAPUAS	490	448	41	1	0	0	490
4	RES BARSEL	295	160	89	7	1	38	295
5	RES BARTIM	292	195	73	17	0	7	292
6	RES BARUT	312	158	132	0	10	12	312
7	RES MURA	274	140	11	38	42	43	274
8	RES KOTIM	592	378	115	75	24	0	592
9	RES KOBAR	390	356	24	0	0	10	390
10	RES SERUYAN	269	173	58	16	3	19	269
11	RES KATINGAN	320	158	108	9	10	35	320
12	RES PULPIS	349	160	102	0	29	58	349
13	RES GUMAS	272	108	57	12	90	5	272
14	RES LAMANDAU	270	179	75	1	9	6	270
15	RES SUKAMARA	265	188	13	58	0	6	265
JUMLAH		8275	5322	1751	348	358	496	
			64,31	21,16	4,21	4,33	5,99	

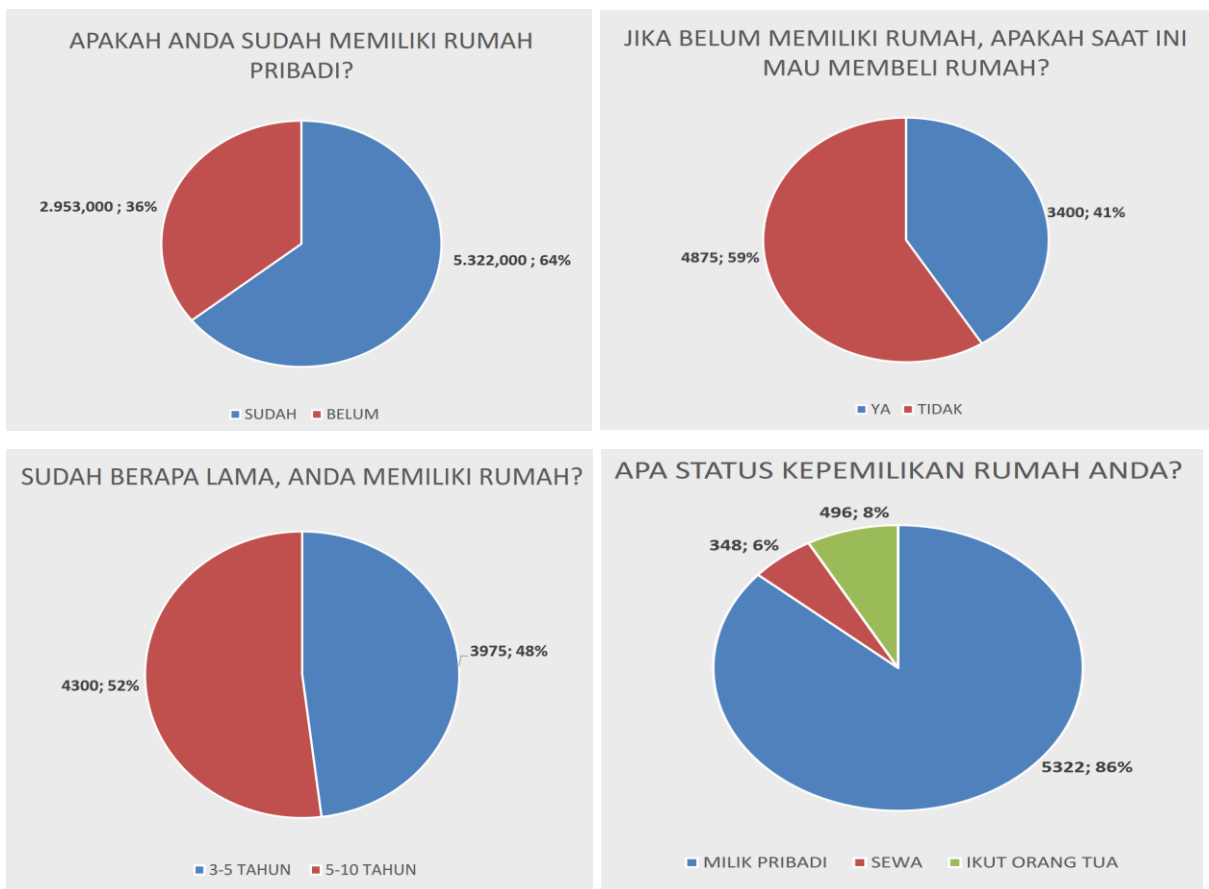
TABEL 3. DATA KEPEMILIKAN RUMAH PERSONEL POLDA KALTENG 2023

DATA KEPEMILIKAN RUMAH PNPP POLDA KALTENG THN 2023 BERDASARKAN KEPANGKATAN

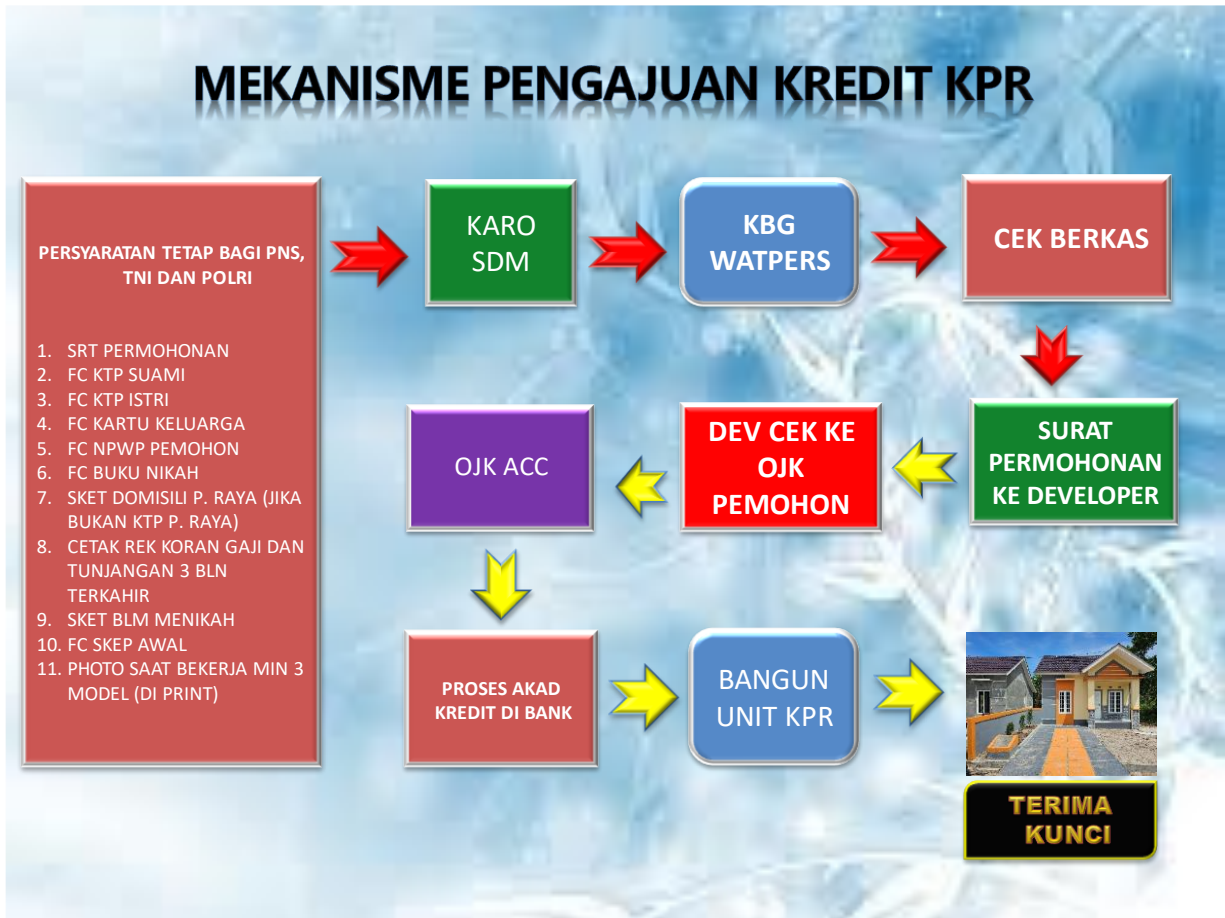
THN	PAMEN	PAMA	BA / TA	ASN	JLM PERS	SDH MILIKI RMH	BLM MILIKI RMH	% YG SDH MEMILIKI RMH	% YG BLM MILIKI RMH
2021	94	198	2111	91	7225	4710	2494	65,19%	34,51%
2022	104	226	2188	115	7735	5102	2633	65,95%	34,04%
2023	156	253	2346	198	8275	5322	2953	62,75%	38,25%

TABEL 4. KEPEMILIKAN RUMAH PNPP POLDA KALTENG BERDASARKAN KEPANGKATAN

DATA PNPP YANG BERMINAT MEMILIKI RUMAH POLRES JAJARAN DAN POLDA KALTENG THN 2024



TABEL 5. PNPP YANG BERMINAT MEMILIKI RUMAH POLRES JAJARAN DAN POLDA KALTENG 2024



GAMBAR 2. MEKANISME PENGAJUAN KREDIT

b. Kondisi yang diharapkan

Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat untuk berlindung dan berkumpul dengan keluarga, disamping itu rumah juga digunakan sebagai investasi masa depan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran penting dalam pembentukan watak serta kepribadian seseorang (Mulyani, 2013). Rumah tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan semata, namun lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan diri dan menunjukkan jati diri. Terpenuhinya perumahan bagi PNPP secara tidak langsung sangat penting dan strategis untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Dimanapun mereka bertugas dalam menjamin profesionalitas kerja dan giat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial di Masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya tidak diiringi dengan pertumbuhan penyediaan perumahan bagi personalia. Perbedaan ini mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal masih sangat tinggi dan menyebabkan harga rumah terus melambung mengikuti permintaan yang tak

kunjung terpenuhi. Di sisi lain, person finansial juga berpengaruh terhadap daya beli dan personalia personalia untuk memiliki sebuah rumah. Bahkan, keterbatasan finansial juga mempengaruhi personalia untuk memiliki hunian yang layak. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, hunian yang layak adalah hunian yang memiliki persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengkategorikan sebuah tempat tinggal layak huni apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu memiliki kecukupan luas tempat tinggal 7,2 m², memiliki akses terhadap air bersih, memiliki akses terhadap air minum yang layak, memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, dan memiliki ketahanan bangunan. Dalam mewujudkan personalia yang personalia, penyediaan hunian yang layak merupakan sebuah usaha yang tak terpisahkan dalam meningkatkan taraf hidup personalia. Keterbatasan personalia dalam memperoleh akses terhadap hunian yang layak menjadi pesona bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengisi *gap* tersebut dalam meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses. Program Kapolri untuk pemenuhan kebutuhan PNPP dengan target 100.000 rumah, yang merupakan bagian dari program 100 hari Kapolri, menunjukkan bahwa tekad Kapolri untuk memenuhi kesejahteraan anggota/PNPP melalui perumahan dan menjadi atensi dari semua Kasatker dari seluruh jajaran Polri.

Minat beli adalah tahap 24 person konsumen atau pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk serta mengkonsumsinya (Suharno dalam Ali, 2017). Pengambilan 24ersonal24 oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan dan keinginan (Ali, 2017). Selanjutnya jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang diinginkan, dari berbagai informasi yang diperoleh konsumen melakukan seleksi atas alternatif-alternatif yang tersedia. Seleksi ini dilakukan karena untuk beberapa

kebutuhan konsumen akan sangat selektif dalam mempertimbangkan pembelian, salah satunya adalah rumah.

Pemberian subsidi pada bidang perumahan merupakan salah satu kebijakan pemerintah terhadap penyediaan perumahan khususnya Masyarakat yang berpenghasilan rendah, fasilitas instrument dalam pembiayaan pengadaan dengan berbiaya murah, baik subsidi maupun non-subsidi ini sudah banyak tersedia dan pihak perbankan siap untuk menawarkan produk-produk pembiayaannya. Konsumen memutuskan pembelian rumah dengan mempertimbangkan harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk tersebut (Kotler & Armstrong, 2006:439). Dalam proses penetapan harga suatu produk didasarkan atas pertimbangan besarnya biaya produksi dan berbagai lainnya agar dapat memperoleh laba. Selain itu, penetapan harga juga harus disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan dan kemampuan konsumen agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Untuk mewujudkan perubahan terkait hal tersebut kiranya dapat dilakukan langkah inovatif guna mengoptimalkan pelaksanaan Penyediaan Perumahan sebagai berikut :

1. Pengadaan perumahan KPR bersubsidi untuk PNPP yang berjalan baik karena memang ada permintaan yang tinggi dan proses dukungan dari pimpinan Kepolisian sangat Tinggi dan intensif;
2. Fasilitas, instrument dalam pembiayaan pengadaan perumahan berbiaya murah, baik bersubsidi ataupun non-subsidi, sudah banyak tersedia dan pihak perbankan siap untuk menawarkan produk-produk pembiayaan mereka.
3. Pembiayaan perumahan oleh para perbankan masih terfokus pada pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan oleh negara.
4. Umumnya lokasi perumahan KPR bersubsidi terpaksa harus dibangun pada lokasi yang kurang strategis, karena persoalan harga tanah.
5. Pengadaan perumahan pemilikan pribadi bagi PNPP dapat dilakukan melalui dua skema pilihan, pertama adalah pilihan melalui KPR non-subsidi dan kedua KPR FLPP bersubsidi. Pihak perbankan dalam memfasilitasi aspek

pembiayaan untuk personalian fasilitas perumahan PNPP menyatakan telah siap dengan berbagai skema pilihan, termasuk skema pembiayaan untuk PNPP (BRI dan BTN).

6. Sebagian besar PNPP mengambil pinjaman di luar KPR. Ini adalah fenomena umum yang lazim ditemui sebagai suatu coping strategi PNPP dalam mengatasi beragam kebutuhan.
7. pimpinan wilayah menerapkan diskresi untuk mengendalikan permohonan pinjaman PNPP. Diskresi ini berhubungan dengan pengendalian dalam besar pinjaman dan pengarahan dalam alokasi penggunaan pinjaman.

Memangkas birokrasi yang menghambat proses Administrasi dalam pengajuan perumahan sehingga mempercepat PNPP untuk memiliki rumah segera terwujud sesuai dengan Program Kapolri untuk pemenuhan kebutuhan PNPP dengan target 100.000 rumah, yang merupakan bagian dari program 100 hari kerja Kapolri, menunjukkan bahwa tekad Kapolri untuk memenuhi kesejahteraan anggota/PNPP melalui perumahan dan menjadi atensi dari semua Kasatker dari seluruh jajaran Polri.

Kasatker menerapkan diskresi untuk mengendalikan permohonan pinjaman PNPP, dilapangan beberapa kali terungkap keprihatinan tentang adanya PNPP yang mengambil pinjaman bernilai tinggi secara akumulatif dibandingkan dengan kapasitas pengembalian dalam pangkat atau golongan yang disandangnya. Pada saat yang sama, peruntukan pinjaman utamanya yang bernilai konsumtif juga menjadi perhatian tersendiri oleh pimpinan wilayah, baik Kapolres maupun Kapolsek. Keprihatinan lain muncul pula dari perbedaan antara apa yang dinyatakan secara formal oleh PNPP dalam permohonannya kepada atasan untuk mendapatkan rekomendasi pinjaman dengan kenyataan yang terjadi setelah pinjaman diperoleh. Diatas beragam keprihatinan ini, sejumlah pimpinan wilayah melakukan assessment yang seksama atas permohonan pinjaman, baik secara administrasi, maupun sosiologis. Secara administrasi kebutuhan dan kapasitas PNPP dievaluasi, sedangkan secara sosiologis anggota keluarga PNPP lazimnya dipanggil untuk dipastikan ketepatan permohonannya. Tidak kurang pula

mekanisme ground check di lapangan diterapkan untuk, sekali lagi memastikan kapasitas dan ketepatan permohonan pinjaman.

Dari uraian latar belakang dan analisis terhadap permasalahan tersebut di atas, maka dapat diusulkan sebuah gagasan proyek perubahan yaitu “**STRATEGI KEPEMILIKAN RUMAH BAGI PNPP POLDA KALTENG**” yang secara garis besarnya para PNPP dengan SMART dapat memiliki rumah yang memiliki arti sebagai berikut :

Spesific yaitu **pemilihan lokasi, fasilitas, instrument dalam pembiayaan perumahan berbiaya murah**, baik subsidi maupun non-subsidi, sudah banyak tersedia tinggal keinginan untuk memiliki tempat tinggal/rumah.

Measureable yaitu bahwa dalam **memilih dan membeli perumahan harus terukur sesuai dengan target kemampuan** personal dan anggaran yang dimiliki.

Achievable yaitu **target** untuk memiliki rumah berdasarkan informasi yang ada dan di terima dengan data yang akurat harus bisa dicapai **sesuai kemampuan finansial** yang ada.

Relevant yaitu dengan **memiliki rumah** atau tempat tinggal yang **layak** akan mendukung tugas-tugas kepolisian dimanapun bertugas dalam menjamin profesionalitas kerja dan giat dalam menjaga keamanan dan ketertiban social.

Timely yaitu pada pelaksanaan untuk memiliki rumah oleh **waktu** yang sangat sempit dan **mendesak** maka sangat perlu dipertimbangkan untuk segera memiliki tempat tinggal/rumah sendiri.

c. **Isu Strategis**

Isu strategis dalam penyusunan proyek perubahan ini adalah melaksanakan penataan personel dalam Percepatan Perumahan dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan PNPP di Polda Kalimantan Tengah. Banyaknya personel yang belum memiliki rumah dengan melihat lahan yang masih luas sehingga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh stakeholder dan personel Polda Kalimantan Tengah dalam membangun perumahan dengan berbiaya murah sehingga seluruh PNPP dapat memiliki rumah dengan berbiaya yang murah dan terjangkau oleh PNPP dan Masyarakat luas lainnya. Di Kalimantan Tengah. Ini

harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga situasi yang kondusif di Kalimantan Tengah.

B. INOVASI DAN OUTPUT PERUBAHAN

1. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan umum dari proyek perubahan ini adalah untuk menciptakan solusi terhadap Kepemilikan rumah bagi PNPP Polda Kalteng agar dapat memperoleh keberhasilan sesuai harapan. Tujuan umum tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka Panjang.

Tujuan jangka pendek proyek perubahan:

Tujuan jangka pendek adalah memberikan pemahaman dan alternatif tindakan kepada personel jajaran Polda Kalimantan Tengah dalam usaha Percepatan Perumahan dalam rangka pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah

- a. Melakukan analisa dengan menyiapkan data dan bahan yang dibutuhkan menjadi kompas utama dari pengerjaan proyek
- b. Meminta petunjuk dan arahan pimpinan yaitu Karo SDM Polda Kalteng dalam rangka penyusunan PKS atau MoU Perumahan bagi PNPP Polda Kalteng dengan Stakeholder yang ada diwilayah Polda Kalteng dan Jajaran Polda Kalteng.
- c. Melakukan maping terhadap personil yang terlibat dalam Tim Efektif untuk bisa bekerja sesuai dengan kemampuan personal;
- d. Merumuskan pembuatan darff Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU tentang Perumahan bagi PNPP Polda Kalteng dengan bekerjasama dengan stakeholder provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Implementasi atau pengesahan Bijak Kapolda Kalteng berupa PKS atau MoU yang telah dibuat;
- f. Menerapkan Bijak Kapolda Kalteng dalam Sosialisasi kepada PNPP Polda Kalteng dan Polres Jajaran mengenai Kepemilikan Rumah Bagi PNPP.

Tujuan jangka menengah proyek perubahan:

Tujuan jangka menengah adalah menyediakan piranti lunak sebagai payung hukum, PKS dalam melaksanakan Proses Percepatan penyediaan Perumahan dalam rangka pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP dan Masyarakat bagi personel Polda dan Polres jajaran Polda Kalteng.

1. **Meningkatkan Aksesibilitas:** Memastikan bahwa perumahan tersedia bagi PNPP dan lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.
2. **Pengembangan Infrastruktur:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan listrik untuk mendukung kawasan perumahan yang baru.
3. **Sustainability Lingkungan:** Mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam desain perumahan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah.
4. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Menyediakan fasilitas umum seperti taman, sekolah, dan pusat kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni.
5. **Peningkatan Ekonomi Lokal:** Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha kecil di sekitar kawasan perumahan.
6. **Perencanaan Tata Ruang:** Mengembangkan rencana tata ruang yang terencana **agar** penggunaan lahan lebih efisien dan terorganisir.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pengembangan perumahan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Tujuan jangka panjang proyek perubahan:

Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kinerja personel Polda Kalimantan Tengah bersama stakeholder terkait dalam Percepatan Perumahan dalam rangka Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mampu Meningkatkan jumlah PNPP yang memiliki Rumah.

- a. Melakukan Sosialisasi secara kontinyu kepada PNPP tentang Perumahan bagi PNPP baik pada Polda maupun Polres Jajaran Polda Kalteng.

- b. Penyediaan Perumahan yang Terjangkau Mewujudkan akses perumahan yang terjangkau bagi PNPP dan semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.
- c. Pengembangan Kota Berkelanjutan Menciptakan kawasan perumahan yang berkelanjutan, mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dan keberlanjutan dalam perencanaan dan pembangunan.
- d. Kualitas Hidup yang Tinggi Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
- e. Terselenggaranya Sinergitas stakeholder dlm percepatan perumahan dlm pemenuhan hak dan kesejahteraan PNPP secara konsisten;
- f. Melaksanakan Anev setiap Semester (6 Bulan) pada pendataan yang berminat untuk memiliki Rumah oleh Polda Kalteng dan jajaran Polda Kalteng;

2. Manfaat Proyek Perubahan

a. Manfaat internal

- 1). Manfaat bagi Polda Kalimantan Tengah adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Kalimantan Tengah dalam menciptakan situasi yang kondusif khususnya dalam Usaha Percepatan Perumahan dalam rangka pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2). Manfaat bagi Biro SDM Polda Kalimantan tengah adalah:
 - a) Terwujudnya manajemen pelaksanaan mekanisme verifikasi Data dan ADM dalam upaya Pengajuan Percepatan Perumahan dalam rangka Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP Polda Kalimantan Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b) Mengoptimalkan kerja sama dgn stakeholder terkait dalam Proses Percepatan Perumahan dalam rangka Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP Polda Kalimantan Tengah dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Manfaat eksternal

Manfaat pihak eksternal dalam proyek perubahan ini adalah produktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat merasakan dengan ketersediaan Perumahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana

Masyarakat dapat hidup berdampingan dengan PNPP yang berharap dapat menimbulkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan tempat tinggal.

3. Output Proyek Perubahan

Output atau keluaran yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah:

- a. Tersusunnya petunjuk dan arahan kepada PNPP Satker Polda dan personel Polres jajaran Polda Kalteng dalam pelaksanaan tugas (Rapat, Penyediaan Surat Menyurat, Noutulen dan Dokumentasi Pelaksanaan) di wilayah hukum Polda Kalteng.
- b. Melaksanakan Kegiatan Persamaan Persepsi dengan Kordinasi dan Kolaborasi dalam rangka Percepatan Perumahan untuk memenuhi Hak dan Kesejahteraan PNPP dan Masyarakat Di wilayah Hukum Polda Kalteng.
- c. Tersusunnya dan disahkannya Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU), metode kerja dalam bentuk Standar Perumahan, serta Tatacara Pengajuan dan Pemberian pinjaman Uang Muka Kredit pemilikan rumah bagi PNPP di wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.
- d. Pelaksanaan sosialisasi metode kerja Standar Perumahan, Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MOU) serta Tatacara Pengajuan dan Pemberian pinjaman Uang Muka Kredit pemilikan rumah Kepada PNPP Satker Polda dan Personel Polres Jajaran Polda Kalimantan Tengah agar memiliki Pemahaman terhadap Mekanisme dan Proses Pengajuan Percepatan Perumahan dalam rangka Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan bagi PNPP dan Masyarakat di wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.
- e. Laporan pelaksanaan Kegiatan Percepatan Perumahan dalam rangka Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP Satker Polda dan Polres jajaran di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

4. Outcome Proyek Perubahan

Outcome atau hasil yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah dapat terbentuknya sistem Kepemilikan Rumah Bagi PNPP Polda Kalteng yang lebih baik dan Sistematis dalam mengajukan kredit kepemilikan rumah bagi PNPP baik di Polda maupun Polres Jajaran Polda Kalteng. Memudahkan administrasi baik

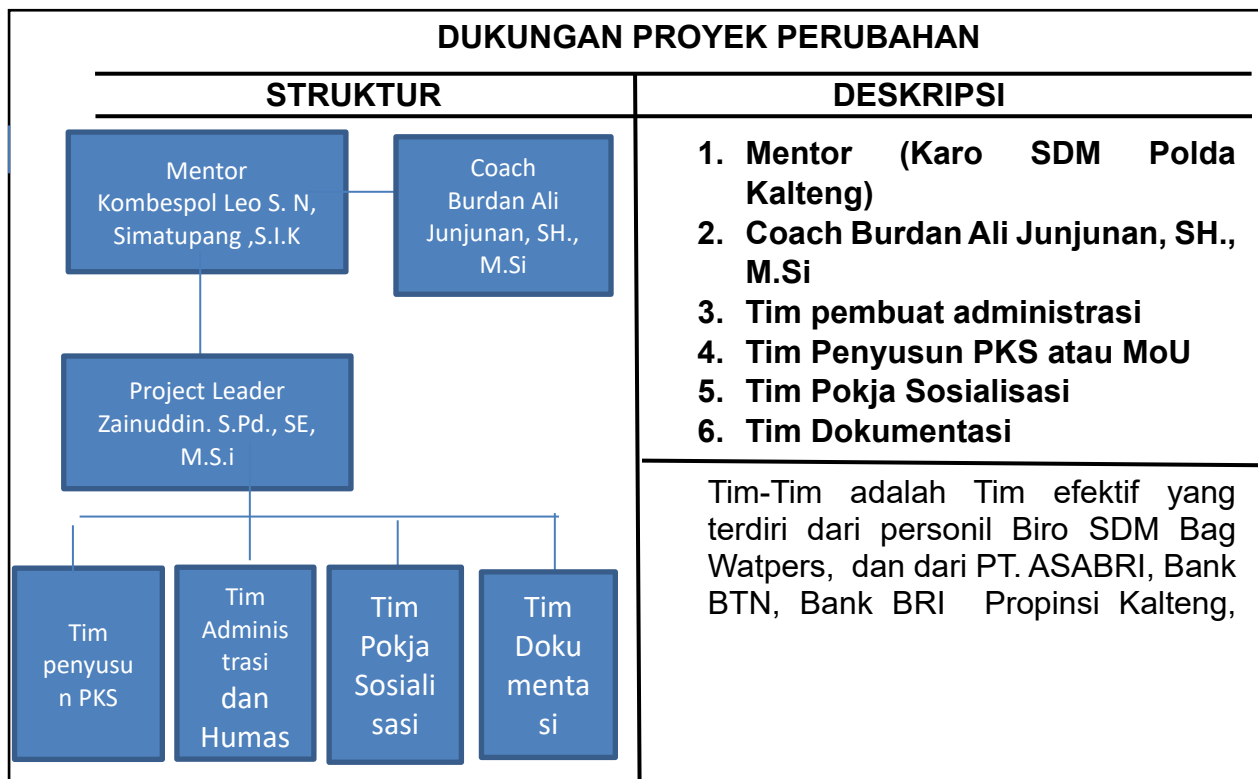
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan analisa evaluasi data Kepemilikan Rumah bagi PNPP yang diselenggarakan oleh polda Kalteng dan jajaran Polda Kalteng.

- a. Tersusunnya Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum Of Understanding (MOU) Kapolda Kalteng tentang mekanisme pelaksanaan Percepatan Perumahan dalam rangka Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP di Polda Kalimantan Tengah.
- b. Meningkatnya/Naiknya jumlah Kepemilikan Rumah bagi PNPP di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. RUANG LINGKUP

Untuk dapat mencapai keberhasilan dengan hasil yang optimal dalam realisasi proyek perubahan ini, perlu disusun rencana rancangan *milestone* atau tonggak pencapaian sebagai tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan tahapan jangka panjang sebagai berikut:

Kunci keberhasilan Proyek Perubahan



GAMBAR 3. STRUKTUR TIM PENYUSUN PROYEK PERUBAHAN



URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF

KOMPONEN	PERAN
MENTOR	<ul style="list-style-type: none"> • Membimbing Peserta dengan professional • Memberikan bimbingan dalam penyusunan proyek perubahan dan membantu permasalahan yang muncul. • Membantu peserta dalam pemetaan <i>agenda project</i> yang akan dilaksanakandan dan rencana jadwal pertemuan. • Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen proyek perubahan. • Memantau setiap perkembangan proyek perubahan dengan meminta progress setiap minggunya. • Memantau capaian yang didapat peserta sesuai dengan milestones yang telah ditetapkan oleh peserta dalam proyek perubahan. • Memberikan dukungan pada peserta dalam mendayakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan. • Berperan sebagai inspiratordalam melaksanakan inovasi yang diperlukan.
COACH	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan motivasi pada peserta

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring kegiatan peserta, melalui media online (Zoometing, WA grop dan Chatting) • Koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami kendala. • Memberikan masukan kepada peserta terkait usulan proyek perubahan. • Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek perubahan.
--	--

KOMPONEN	PERAN
PROJECT LEADER	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penyusunan proyek perubahan. • Mengambil inisiatif komunikasi dengan mentor. • Membangun komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder baik internal dan eksternal. • Melakukan eksekusi seluruh tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki. • Secara aktif melakukan diskusi dan bertanya atau melaporkan. • Melaporkan progress perkembangan proyek perubahan kepada Coach. • Menggerakkan seluruh elemen stakeholder internal dan eksternal dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi proyek perubahan. • Menyusun laporan proyek perubahan
TIM EFEKTIF	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima perintah dari Project Leader dan melaksanakannya. • Membuat seluruh dokumen administrasi yang diperlukan dalam pembuatan laporan proyek perubahan.

	<ul style="list-style-type: none">• Mendistribusikan dokumen administrasi seperti nota dinas dan undangan.• Membuat notulen pada setiap rapat.• Menyiapkan ruang rapat• Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan selama penyusunan proyek perubahan.• Selalu melaporkan kepada project leader jika ada kendala dan kesulitan.• Taat setia dan loyal kepada Project Leader selama pembuatan proyek perubahan
--	---

TABEL 6. URAIAN TIM EFEKTIF

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. TAHAPAN STRATEGIS RENCANA PROYEK PERUBAHAN

Untuk dapat mencapai keberhasilan dengan hasil yang optimal dalam realisasi proyek perubahan ini, perlu disusun rencana rancangan *milestone* atau tonggak pencapaian sebagai tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan tahapan jangka panjang sebagai berikut:

TAHAPAN DAN JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN										OUTPUT TAHAPAN DAN JENIS KEGIATAN
		SEP			OKT				NOP			
A. Jangka Pendek		III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	Laporan Proyek Perubahan	
1. Rapat Pembentukan Tim Efektif												
• Koordinasi dgn mentor terkait dgn RPP	Project Leader										Persamaan Persepsi, Dokumentasi, Hasil	
• Perumusan Draft Sprin Tim Efektif	Project Leader										Draf Sprin Tim Efektif, Dokumen, Notulen.	
• Penetapan Sprin Tim Efektif	Project Leader										Sprin, Jukrah Tim Efektif, Dokumentasi	
• Melaks Rapat Tim Efektif	Project Leader										Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi	
2. Sosialisasi Metode Kerja kpd pers / tim Kerja	Project Leader										Metode Kerja dan Bagi Tgs, Dokumentasi, Notulen,	
3. Mendatakan PNPP yang Berminat untuk memiliki Rumah	Project Leader										Sprin; Membuat kuesoner / survey; Membuat Google Forms	
4. Melaksanakan Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder tentang Kepemilikan Rumah bagi PNPP telah dibuat.	Project Leader										- Surat Pemberitahuan; - Dokumentasi; - Daftar Hadir; - Notulen.	
5. Melaksanakan Sosialisasi Perumahan Kepada PNPP tentang kepemilikan Perumahan.	Project Leader										- Pada saat Apel gabungan Personel Polda Kalteng;	

13	Menyajikan Draf PKS yang sudah disepakati oleh Stakeholder	Project Leader																	Nota Dinas; Draf PKS yang sudah siap untuk di tanda tangani.
----	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

TABEL 7. MILESTONE JANGKA PENDEK

TAHAPAN DAN JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN												OUTPUT TAHAPAN DAN JENIS KEGIATAN	
		2024	2025												
B. Jangka Menengah		XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Laporan Proyek Perubahan
1	Mengoptimalkan giat Sosialisasi														Sosialisasi , Draf PKS yg sdh di ttd dan di sepakati Bersama, laporan sosialisasi, dokumentasi.
2	sosialisasi dgn stakeholder kpd PNPP														
3	Mengecek Kembali penyediaan / bangunan oleh pengembang.														

TABEL 8. MILES JANGKA MENENGAH

C. Jangka Panjang																
1	Sinergitas stakeholder dlm percepatan perumahan dlm pemenuhan hak & kesejahteraan PNPP	Project Leader														1. Percepatan Perumahan dimonitor, diawasi dan dievaluasi agar bisa berjalan maksimal.
2	Pelaks Monev	Project Leader														2. Peningkatan jlm PNPP yg akan memiliki rumah sehingga dpt melaksanakan tgs dgn baik

TABEL 9. MILESTONE JANGKA PANJANG

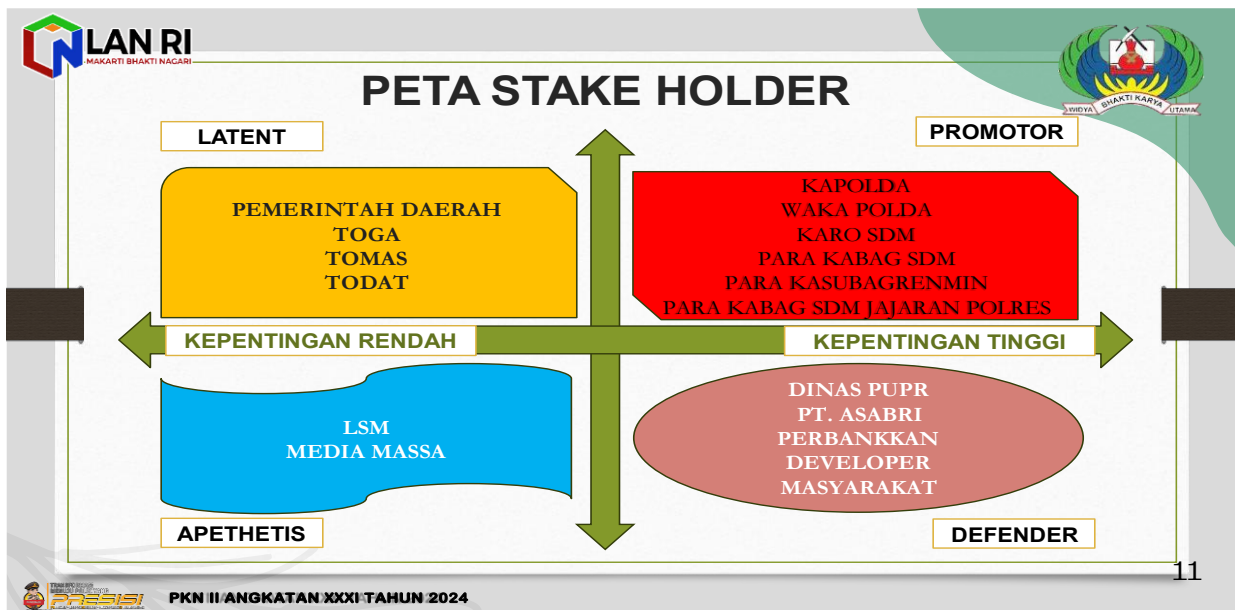
B. STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN

1. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

Stakeholder dalam proyek perubahan ini adalah semua pihak yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Polda Kalimantan Tengah yang terkait atau memiliki kepentingan dan menerima manfaat proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Proyek Perubahan ini stakeholder dikelompokkan berdasarkan pengaruh/kekuasaan dan kepentingan yang dimilikinya, yaitu:

- a. **Promoter**, yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh besar/tinggi terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori Promoter meliputi:
1. Kapolda Kalteng;
 2. Wakapolda Kalteng;
 3. Karo SDM Polda Kalteng;
 4. Para Kabag SDM Biro SDM;

5. Para Kasubagrenmin Satker;
 6. Para Kabag SDM Polres Jajaran.
- b. **Defender**, yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh kecil/rendah terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori Defender meliputi:
1. Dinas PUPR Provinsi Kalteng.
 2. PT. Asabri Provinsi Kalteng.
 3. Perbankan Provinsi Kalteng
 4. Developer / Pengembang Provinsi Kalteng,
 5. Masyarakat umum
- c. **Latent**, yaitu stakeholder yang memiliki pengaruh besar/tinggi dan kepentingan kecil/rendah terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori Latent meliputi:
1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng;
 2. Tokoh Agama;
 3. Tokoh Masyarakat;
 4. Tokoh Adat.
- d. **Apetethis**, yaitu stakeholder yang memiliki pengaruh kecil/rendah dan kepentingan kecil/rendah terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang termasuk ke dalam kategori Latent meliputi:
1. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
 2. Media Massa.



GAMBAR 4. PETA STAKEHOLDER

C. PERAN, PENGARUH DAN INTENSITAS

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perumahan dan permukiman antara lain:

1. **Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:** UU ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, termasuk prinsip-prinsip pembangunan, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat.
2. **Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun:** UU ini mengatur tentang penyelenggaraan, pengelolaan, dan hak-hak penghuni rumah susun, termasuk aspek kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
3. **Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung:** Mengatur aspek teknis dan administratif pembangunan gedung, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
4. **Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:** Mengatur lebih lanjut tentang kebijakan dan strategi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

UU dan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau.

maka peran dan pengaruh stakeholder sangat mendukung terciptanya proyek perubahan ini, antara lain:

- ✓ **Langsung:** peran langsung dalam proyek perubahan adalah pihak stakeholder yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan baik Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penganggaran dalam proses Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda Kalteng dan Polres Jajaran.
- ✓ **Tidak langsung:** peran tidak langsung dalam proyek perubahan adalah stakeholder terlibat tidak langsung dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, pengawasan, dan penganggaran dalam proses Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda Kalteng dan Polres Jajaran.
- ✓ **Stakeholder Internal:** merupakan pemangku kepentingan dari lingkungan Polri antara lain
 1. Pimpinan Polri atau Kapolda berperan dalam mengambil keputusan
 2. Karo SDM, Kapolres dan jajaran polres berperan penting dalam keberhasilan proyek perubahan ini.
 3. Tim efektif berperan dalam penyusunan proyek perubahan ini.
- ✓ **Stakeholder eksternal:** merupakan pemangku kepentingan diluar dari lingkungan Polri terlibat langsung maupun tidak langsungn penyusunan dan implementasi proyek perubahan anta lain:
 1. PT. ASABRI cab. Palangka Raya Propinsi Kalteng berperan dalam penyusunan proyek perubahan ini.
 2. BANK BTN Cab. Palangka Raya Propinsi Kalteng berperan dalam penyusunan proyek perubahan ini.
 3. BANK BRI Cab. Palangka Raya berperan dalam penyusunan proyek perubahan ini
 4. PNPP sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan hasil dari proyek perubahan ini.

B. RENCANA STRATEGI MARKETING SEKTOR PUBLIK

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini adalah strategi Marketing Mix 4P1C (Product, Price, Place, Promotion dan Customer) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Product

Product yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini adalah 2 bentuk, yaitu:

- a. Produk dalam bentuk Perumahan yang telah dibangun dalam rangka sosialisasi atau promosi yang akan di tawarkan kepada PNPP dan Masyarakat.
- b. Yang kedua adalah produk dalam bentuk brosur yang akan di sosialisasikan oleh pihak perbankan dan pihak Developer / Pengembang yang akan di tawarkan kepada PNPP dan Masyarakat.
- c. berupa Surat Perjanjian Kerjasama dengan stakeholder yang sudah disepakati Bersama tentang mekanisme kepemilikan Perumahan oleh PNPP dan Masyarakat di wilayah hukum Polda Kalteng.

2. Price

Price atau harga dapat diartikan sebagai pengorbanan / pembayaran Uang Muka (DP), waktu dan Tenaga yang telah digunakan oleh PNPP dan Masyarakat untuk memiliki Perumahan, termasuk kepuasan dari diri sendiri yang dirasakan oleh PNPP dan masyarakat untuk memiliki rumah tersebut.

3. Place

Tempat dilaksanakannya terobosan dalam proyek perubahan adalah seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kawasan hutan dan Tanah yang sangat Luas sangat memungkinkan Pembangunan perumahan dengan luas tanah 150 M2 (10 x 15) untuk bangunan perumahan.

4. Promotion

Untuk promosi yang efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu melalui media social, WA Grup, Website Biro SDM Polda Kalteng untuk memberikan informasi kepada PNPP dan masyarakat tentang Perumahan baik yang tersedia dan akan dibangun oleh para Developer/ Pengembang di wilayah hukum Polda dan Polres Jajaran Polda Kalteng.

5. Customer

Customer dalam proyek perubahan ini adalah Seluruh PNPP dan masyarakat umum yang merasakan manfaat dari Perumahan yang telah disediakan dalam rangka pemenuhan Hak dan Kesejahteraan PNPP Polda Kalteng dan Polres jajaran Polda Kalteng.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN TAHAPAN STRATEGIS

1. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN

Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan melalui koordinasi dengan mentor selaku atasan langsung dan pemantauan proyek perubahan dengan bimbingan coach. Dalam melaksanakan dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam proyek perubahan termuat dalam tabel capaian proyek perubahan jangka pendek sebagai berikut.

No	Tahapan	Timeline	Realisasi	Evidence	Pencapaian
Jangka Pendek 2 Bulan (60 Hari)					
1	Rapat Pembentukan Tim Efektif, Koordinasi dengan Mentor, Perumusan Draf Sprin Tim Efektif, Penetapan Sprin Tim Efektif dan Melaksanakan Rapat Tim Efektif	Minggu Ke III	21-23 Sep 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan Persepsi; - Sprin Tim Efektif; - Daftar Hadir; - Jukrah; - Notulen; - Dokumentasi 	Sesuai Rencana dan Target
2	sosialisasi Metode Kerja Kepada Personel / Tim Kerja	Minggu Ke IV	26 Sep 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sprin; - Metode Kerja; - Pembagian Tugas Kepada Tim Efektif; - Dokumentasi; - Daftar Hadir; - Notulen. 	Sesuai Rencana dan Target
3	Mendatakan PNPP yang Berminat untuk memiliki Rumah	Minggu Ke V.	30 Sep 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sprin; - Membuat kuesoner / survey - Membuat Google Forms 	Sesuai Rencana dan Target

4	Melaksanakan Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder tentang Kepemilikan Rumah bagi PNPP telah dibuat.	Minggu Ke I	1 Okt 2024	- Surat Pemberitahuan; - Dokumentasi; - Daftar Hadir; - Notulen.	Sesuai Rencana dan Target.
5	Melaksanakan Sosialisasi Perumahan Kepada PNPP tentang kepemilikan Perumahan.	Minggu Ke I	4 Okt 2024	- Pada saat Apel gabungan Personel Polda Kalteng; - Dokumentasi - Notulen	Sesuai Rencana dan Target.
6	Melaksanakan Sosialisasi kepada PNPP Satker dan Polres Jajaran tentang Perumahan.	Minggu Ke II	8 Okt 2024	- ST ke Jajaran - Sprin - Dokumentasi - Daftar Hadir - Notulen	Sesuai Rencana dan Target.
7	Melaksanakan Pertemuan dengan Tim Efektif dalam penyusunan Draf PKS.	Minggu Ke II	10 Okt 2024	- Nota Dinas; - Draf PKS yang sudah disusun; - Daftar hadir; - Dokumentasi; - Notulen.	Sesuai Rencana dan Target.
8	Melaksanakan Survey Lokasi penyediaan Perumahan oleh Developer/ Pengemban.	Minggu Ke III	14 Okt 2024	- Daftar Hadir; - Dokumentasi; - Notulen.	Sesuai Rencana dan Target.
9	Melaksanakan sinkronisasi PKS dengan Bidkum dan Setum Polda (berkaitan dgn Bahasa Hukum dan Tata Naskah)	Minggu Ke III	17 Okt 2024	- Nota Dinas; - Daftar Hadir; - Notulen; - Dokumentasi.	Sesuai Rencana Dan Target.
10	Melakukan Brend Market ke PUPR untuk mengetahui kegiatan	Minggu Ke IV	28 okt 2024	- Surat Pemberitahuan; - Dokumentasi; - Daftar Hadir; - Notulen.	Sesuai Rencana dan Target

	Penyediaan Perumahan.				
11	Melaksanakan Koordinasi berkaitan dengan metode penyediaan perumahan bagi anggota (study Banding) dengan TNI	Minggu ke IV	31 Okt 2024	- Surat Pemberitahuan; - Dokumentasi; - Notulen	Sesuai Rencana dan Target.
12	Melaksanakan Singkronisasi Draf PKS dengan Stakeholder Terkait.	Minggu Ke III	21 Nov 2024	- Surat Undangan; - Daftar Hadir; - Dokumentasi; - Notulen.	
13	Menyajikan Draf PKS yang sudah disepakati oleh Stakeholder	Minggu Ke IV	28 Nov 2024	- Nota Dinas; - Draf PKS yang sudah siap untuk di tanda tangani.	Sesuai Rencana dan Target.

TABEL 10. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN

2. KESESUAIAN ANTARA MILESTONE DAN IMPLEMENTASI

Pelaksanaan implementasi proyek perubahan sampai dengan akhir waktu yang diberikan yaitu selama 60 hari telah berhasil diselesaikan semuanya. Ada 13 milestone jangka pendek terselesaikan 100 %, untuk milestone jangka menengah juga terselesaikan 50% yaitu pada pelaksanaan Sosialisasi dan penerapan bijak Kapolda Kalteng pada Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda Kalteng.

CAPAIAN HASIL PROYEK PERUBAHAN

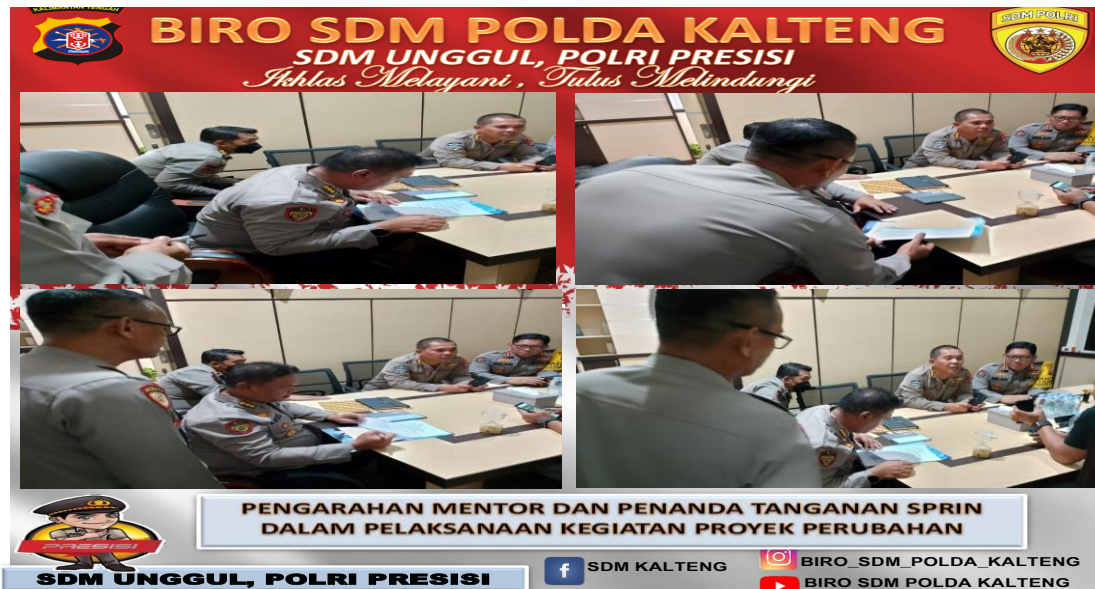
- a. Capaian Milestone 1:** Pembuatan surat perintah tentang penunjukan tim efektif Sebelum pembentukan Tim Efektif, akan dibuat surat perintah yang ditandatangani oleh Mentor Karo SDM Polda Kalteng banyak memberikan masukan terkait dengan Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan, serta mendukung proyek perubahan dengan membahas permasalahan Kepemilikan rumah bagi PNPP Polda Kalteng yang tujuannya adalah sebagai informasi penting kepada para stakeholder terkait data Kepemilikan Rumah bagi PNPP dengan harapan dapat membantu Pembangunan Perumahan bagi PNPP

Polda Kalteng dengan Masyarakat sekitar. sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat dan pengentasan kemiskinan segera teratasi.



GAMBAR 5

PENGARAHAN MENTOR TERHADAP TIM EFEKTIF



GAMBAR 6

PENGARAHAN DAN PENANDATANGANAN SPRIN GIAT PROPER

b. Capaian Milestone 2: Rapat Tim Efektif

Melaksanakan rapat koordinasi dengan staf Bag Watpers Biro SDM Polda Kalteng, Yang telah ditunjuk dalam surat perintah. Dalam rapat koordinasi ini Project Leader memaparkan berbagai aspek dari proyek perubahan yang direncanakan termasuk milestonesnya dan meminta komitmen dan tanggung jawab staf yang terlibat dalam proyek perubahan.



GAMBAR 9

RAPAT DAN METODE KERJA TIM EFEKTIF

- c. Capaian Milestone 3 :** Telah melakukan pendataan PNPP yang Berminat untuk memiliki Rumah dengan membuat Membuat kuesoner / survey Membuat Google Forms bagi PNPP yang belum memiliki rumah dan ada keinginan untuk memiliki, mengingat PP Nomor 42 Tahun 2010 yang mengatur tentang hak-hak kepemilikan rumah murah dan layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya bagi PNPP dengan memanfaatkan momen UU No. 4 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP

Tapera), ada ruang bagi anggota dan PNS Polri untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah murah dan layak huni sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam peningkatan kesejahteraan bagi PNPP.



BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Ikhlas Melayani, Tulus Melindungi



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH


SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KALTENG		DERAJAT : KILAT
KEPADA : DISTRIBUSI A-2 KMA B DAN C POLDA KALTENG		KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN : KAPOLDA KALTENG		

NOMOR: ST/ 649 /IX/HUM.1.1./2024 TGL: 23-9-2024

AAA TTK REF TTK DUA		
SATU TTK	UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK	
DUA TTK	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2010 TTG HAK-HAK ANGGT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK	
TIGA TTK	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TTG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PUM KPR (PINJAMAN UANG MUKA KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH) BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK	
BBB TTK	SEHUB DGN REF D ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD TSB ALAMAT BHW DLM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN HAK PNPP POLDA KALIMANTAN TENGAH TERKAIT KEBUTUHAN AKAN SARANA RUMAH HUNIAN KMA POLDA KALTENG MELALUI RO SDM TLH MEMFASILITASI KETERSEDIAAN PERUMAHAN DIMAKSUD TTK	
CCC TTK	BERKAITAN DGN HAL TSB KMA GUNA MENGAKOMODIR KEBUTUHAN KEPEMILIKAN PERUMAHAN SEKALIGUS ADANYA PEMUTAKHIRAN DATA UTK MENGETAHUI SEJAUH MANA TINGKAT KEBUTUHAN PERUMAHAN TSB KMA AGAR SELURUH PNPP POLDA KALTENG MENGISI DATA YG DIPERLUKAN KE DLM LINK GOOGLEDRIIVE YG TERSEDIA TTK	
DDD TTK	AGAR PARA PENGEMBANG FUNGSI SDM PADA MASING-MASING SATKER/SATWIL MEMBANTU KMA MEMONITOR DAN MEMASTIKAN BHW PNPP PADA SATKER/SATWIL TLH MENGISI LINK GOOGLEDRIIVE DIMAKSUD TTK	
EEE TTK	ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK	
FFF TTK	DUM TTK HBS	



 KEPALA BIRO SDM
 LEDIA S. MATUPANG, S.I.K.
 KEMBALA POL NRP 74070770

**ST TENTANG PERMINTAAN DATA KEPEMILIKAN RUMAH SELURUH
PNPP PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN**



SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

 SDM KALTENG

 BIRO_SDM_POLDA_KALTENG

 BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 10

ST PERMINTAAN DATA KEPEMILIKAN RUMAH SELURUH PNPP



GAMBAR 11

DATA KEPEMILIKAN RUMAH PNPP

- d. Capaian Milestone 4:** Melaksanakan Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder tentang proyek perubahan yang telah dibuat dengan Tujuan menyampaikan proyek perubahan kepada stakeholder terkait terhadap pemanfaatan data PNPP yang belum memiliki rumah sebagai acuan rekomendasi kepada stakeholder terkait dalam upaya mendapatkan Gambaran ketersediaan perumahan yang akan dibangun dengan melihat Desain, Lokasi dan Jarak Tempuh sehingga dapat meningkatkan minat bagi PNPP untuk membeli dan memiliki rumah tersebut serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan segera teratasi.

Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder tentang proyek perubahan yang telah dibuat adalah kunci untuk memastikan dukungan dan partisipasi yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- 1. Identifikasi Stakeholder**
- 2. Rencanakan Komunikasi,** Tentukan metode komunikasi, Pilih metode yang paling sesuai, seperti pertemuan tatap muka, webinar, email, atau media sosial. Buat jadwal komunikasi, Rencanakan waktu dan frekuensi komunikasi agar stakeholder mengetahui kapan mereka akan mendapatkan informasi.
- 3. Siapkan Materi**
- 4. Laksanakan Pertemuan,** Adakan pertemuan awal, Sampaikan informasi tentang proyek perubahan kepada stakeholder, dan jelaskan bagaimana mereka akan terlibat. Fasilitasi diskusi Ajak stakeholder untuk memberikan masukan, pertanyaan, dan saran terkait proyek tersebut.
- 5. Tindak Lanjut,** Kumpulkan umpan balik Setelah pertemuan, kumpulkan umpan balik dari stakeholder untuk memahami pandangan mereka, Revisi rencana jika perlu Pertimbangkan masukan yang diterima dan lakukan revisi pada proyek jika dianggap perlu.
- 6. Komunikasi Berkala,** Update rutin Kirimkan pembaruan berkala tentang perkembangan proyek, baik melalui email, newsletter, atau pertemuan lanjutan, Tetap terbuka untuk komunikasi Berikan saluran bagi stakeholder untuk bertanya dan memberikan masukan kapan saja.
- 7. Evaluasi dan Penyesuaian,** Tinjau hasil komunikasi, Evaluasi efektivitas komunikasi yang telah dilakukan, dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Sesuaikan strategi jika perlu: Jika ada masalah dalam komunikasi, sesuaikan strategi untuk memastikan stakeholder tetap terinformasi dan terlibat.
- 8. Dokumentasi**

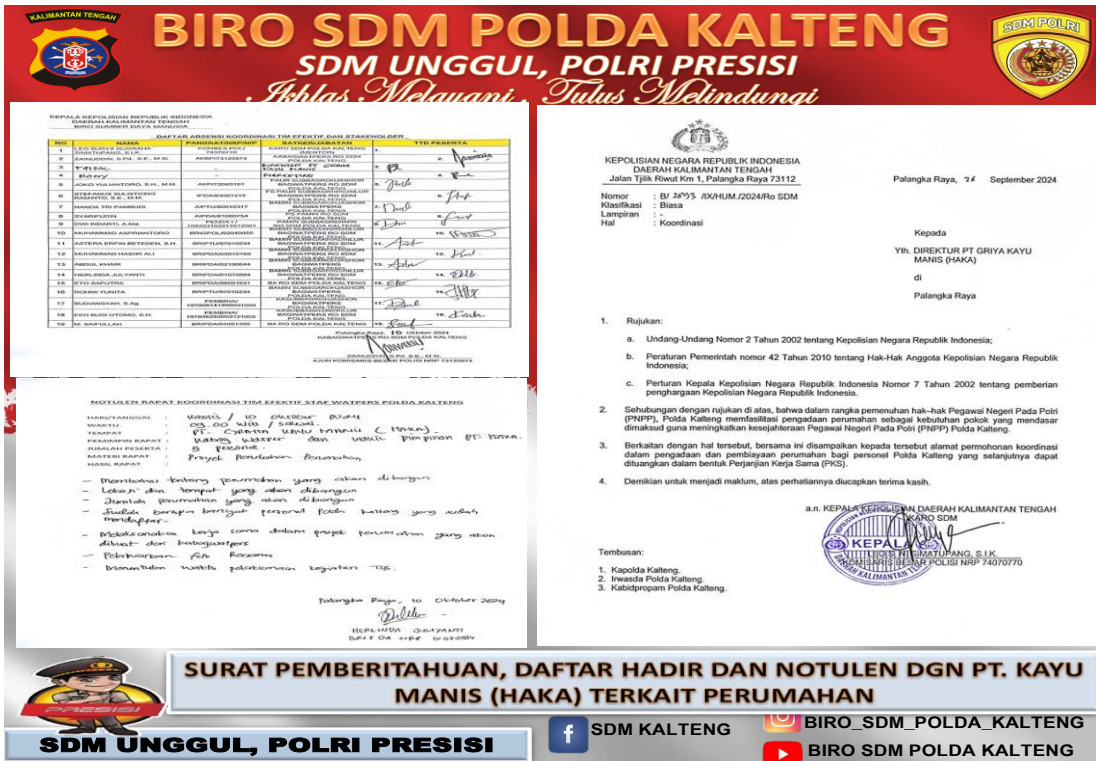
Catat semua komunikasi: Simpan catatan semua interaksi dan umpan balik untuk referensi di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah ini, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder tentang proyek perubahan dapat dilakukan secara efektif, membangun kepercayaan, dan memastikan keberhasilan proyek.



GAMBAR 14

KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN PIM PT. KAYU MANIS

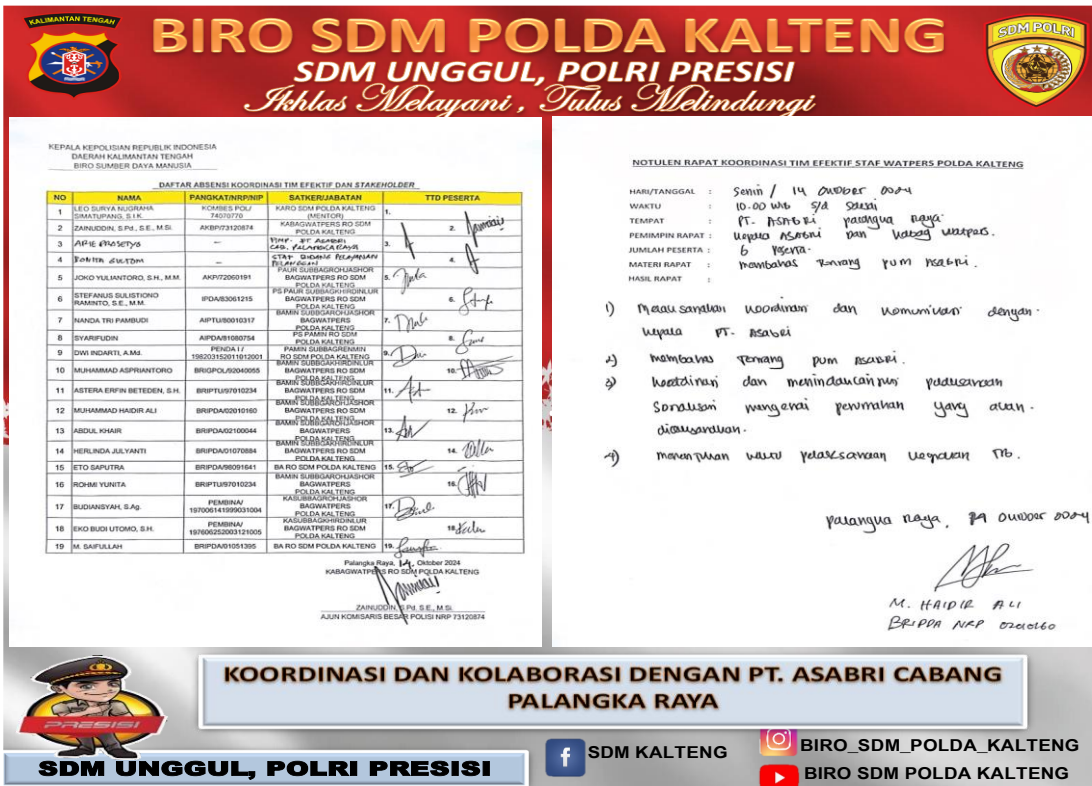


GAMBAR 15

KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN PENGEMBANG



GAMBAR 16
KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN PIMCAB PT. ASABRI



GAMBAR 17
KOORDINASI DAN KOLABORASI PT. ASABRI



GAMBAR 18
KOORDINASI DAN KOLABORASI DENGAN BANK BRI CAB. PALANGKARAYA



GAMBAR 19
SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DGN BANK BRI CAB PALANGKARAYA



KOORDINASI DAN KOLABORASI DGN BANK BTN CAB. PALANGKARAYA TERKAIT PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG
BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 20

KOORDINASI DAN KOLABORASI DGN BANK BTN CAB. PALANGKARAYA



SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DGN BANK BTN CAB. PALANGKARAYA TERKAIT PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG
BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 21

SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DGN BANK BTN CAB. PALANGKARAYA

- e. Capaian Milestone 5 :** Melaksanakan Sosialisasi Perumahan Kepada PNPP tentang kepemilikan Perumahan yang dilaksanakan pada lapangan Apel Barigas Polda Kalteng sebagai Upaya memberikan informasi kepada seluruh personel Polda Kalteng tentang pentingnya rumah serta pengadaan perumahan yang telah dilakukan Kerjasama perumahan dengan stakeholder sehingga bagi personel yang berminat untuk mengambil rumah serta menjelaskan pentingnya rumah bagi seluruh PNPP.

Pada kesempatan apel pagi ini juga disampaikan tentang pendataan bagi PNPP yang sudah atau belum memiliki rumah ini penting untuk sebagai bahan data bagi Biro SDM Polda Kalteng untuk mengetahui jumlah PNPP dalam kepemilikan rumah, diharapkan juga kepada para Kasubagrenmin di satker dan Kabag SDM di jajaran Polres Polda Kalimantan Tengah untuk sesegera mungkin mengecek Kembali bagi PNPP yang akan berminat untuk mengambil rumah dengan mendatakan untuk di serahkan kepada Bag Watpers Biro SDM Polda Kalteng.

Sosialisasi perumahan ini merupakan proses untuk menyampaikan informasi terkait program, kebijakan, dan layanan perumahan kepada PNPP. Tujuan utamanya adalah agar PNPP memahami berbagai aspek perumahan, termasuk:

1. **Informasi Program:** Menjelaskan program perumahan yang tersedia, seperti subsidi perumahan, pembangunan rumah murah, dan lainnya.
2. **Prosedur Akses:** Menginformasikan cara mendaftar, syarat yang diperlukan, dan langkah-langkah untuk mendapatkan akses ke program perumahan.
3. **Kesadaran PNPP dan Masyarakat:** Meningkatkan pemahaman PNPP dan masyarakat tentang pentingnya perumahan yang layak dan aksesibel.
4. **Partisipasi PNPP dan Masyarakat:** Mendorong PNPP dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan perumahan.



GAMBAR 22

SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA KALTENG



GAMBAR 23

SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP

- f. **Capaian Milestone 6** : Melaksanakan Sosialisasi kepada PNPP Satker dan Polres Jajaran tentang Perumahan. Sosialisasi perumahan adalah proses komunikasi dan penyebaran informasi mengenai program perumahan kepada PNPP dan masyarakat. Ini biasanya melibatkan pemahaman tentang kebijakan, manfaat, dan cara akses ke program perumahan yang tersedia. Sosialisasi ini penting untuk memastikan PNPP dan masyarakat mengetahui pilihan perumahan yang ada dan memahami prosedur yang diperlukan untuk mengaksesnya, baik itu melalui pemerintah, pengembang, atau lembaga lainnya.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menunjuk ke Polres – Polres Jajaran Polda Kalteng atau penggunaan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi PNPP dan masyarakat dalam program perumahan dan memastikan mereka mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat.

Perumahan merujuk pada tempat tinggal yang dirancang untuk digunakan sebagai rumah bagi individu atau keluarga. Konsep ini mencakup berbagai jenis hunian, mulai dari rumah tunggal, apartemen, hingga perumahan komunal. Berikut beberapa aspek penting terkait perumahan:

1. **Tipe Perumahan: Rumah Tapak:** Rumah berdiri sendiri yang biasanya memiliki halaman, **Apartemen:** Unit hunian dalam sebuah gedung yang memiliki fasilitas Bersama, **Cluster:** Komplek rumah yang dikelilingi pagar dengan fasilitas bersama.
2. **Kepemilikan: Milik Sendiri:** Pembelian rumah oleh individu atau keluarga dan **Sewa:** Menyewa rumah atau apartemen dari pemilik.
3. **Kebijakan Perumahan:** Program pemerintah untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk subsidi dan perumahan sosial.
4. **Fasilitas:** Perumahan sering kali dilengkapi dengan fasilitas seperti taman, area bermain, dan fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan.
5. **Perencanaan dan Pembangunan:** Melibatkan aspek perencanaan kota, infrastruktur, dan pemanfaatan lahan untuk memastikan hunian yang terencana dan berkelanjutan.

Perumahan yang baik berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat, mendukung kesehatan, dan menciptakan komunitas yang kuat.

KALIMANTAN TENGAH **BIRO SDM POLDA KALTENG** **SDM UNGGUL, POLRI PRESISI**
Ahklas Melayani, Tulus Melindungi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA KALTENG DERAJAT : KILAT
KEPADA : KAPOLRESTA DAN KAPOLRES JAJARAN POLDA KALTENG KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN : 1. KAPOLDA KALTENG
2. IRWASDA POLDA KALTENG
3. KABIDPROGAM POLDA KALTENG

NOMOR: ST/ K/SIP.3.3/2024 TGL: -10-2024

AAA TTK REF TTK DUA
SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK KMA
DUA TTK DIPA RKA-KL RO SDM POLDA KALTENG TA 2024 TTK KMA
TIGA TTK RENJA RO SDM POLDA KALTENG TA 2024 TTK KMA
EMPAT TTK SPRIN KAPOLDA KALTENG NOMOR: SPRIN/1360/X/SIP.3.3/2024 TGL 16 OKTOBER 2024 TTG PENUNJUKAN UTK MELAKSANAKAN TUGAS SUPERVISI FUNGSI SDM SERTA SOSIALISASI HASIL PEAKSANAAN RAKORBIN SDM DAN PNS POLRI T.A. 2024 KEPADA JAJARAN POLDA KALTENG TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA BERSAMA INI DIBERITAHUKAN BAHWA BIRO SDM POLDA KALTENG AKAN MELAKSANAKAN SUPERVISI FUNGSI SDM SERTA SOSIALISASI HASIL PELAKSANAAN RAKORBIN SDM DAN PNS POLRI T.A. 2024 KMA KEGIATAN AKAN DILAKSANAKAN PADA BEBERAPA RAYON POLRES/ITA DAN TINGKAT POLDA DENGAN RINCIAN KEGIATAN SBB TTK DUA.

SATU TTK RAYON I PADA TGL 22 OKTOBER 2024 RES KOTIM KMA RES RATINGAN DAN RES SERUYAN BERGABUNG DI RES KOTIM DGN RESERTA YANG MENGHADIRI KEGIATAN SBB TTK DUA.

AA TTK POLRES KOTIM MENGHADIRIKAN WAKAPOLRES KMA, KABAG SDM KMA, KASIPROGAM KMA, KASIVAS KMA, KAUBINTU PD, SUBSASTIKER POLRES KMA, PR, KABUBBAG DI BAG SDM DAN KASIAM MASINGS POLSEK TTK

BB TTK

ST SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI **SDM KALTENG** **BIRO SDM POLDA KALTENG**
BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 24

ST SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLDA KALTENG

KALIMANTAN TENGAH **BIRO SDM POLDA KALTENG** **SDM UNGGUL, POLRI PRESISI**
Ahklas Melayani, Tulus Melindungi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/1360-X/SIP.3.3/2024

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Supervisi Fungsi SDM serta Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Rakorbin SDM Dan PNS Poli T.A. 2024, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- Peraturan Kapoti Nomor 14 Tahun 2016, tanggal 21 September 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- Peraturan Kapoti Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
- DIPA RKA-KL Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalteng T.A. 2024;
- Rencana Kerja Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalteng T.A. 2024;
- Rencana Pelaksanaan Supervisi Fungsi SDM serta Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Rakorbin SDM Dan PNS Poli T.A. 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT/INRP/INP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk

- di samping tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan tugas Supervisi Fungsi SDM serta Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Rakorbin SDM Dan PNS Poli T.A. 2024, yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 30 Oktober 2024;
- memberikan arahan dan bimbingan kepada satuan terkait;
- melaporkan hasil pelaksanaan Supervisi Fungsi SDM serta Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Rakorbin SDM Dan PNS Poli T.A. 2024 kepada Kapolda Kalteng melalui Karo SDM Polda Kalteng;
- melaksanakan

4. melaksanakan

2 SPRIN KAPOLDA KALTENG
NOMOR : SPRIN/1360-X/SIP.3.3/2024
TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
BIRO SDM

Tembusan:

- Kapolda Kalteng
- Irwasda Polda Kalteng
- Kabidprogam Polda Kalteng.

SPRINT MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLRES JAJARAN DAN POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI **SDM KALTENG** **BIRO SDM POLDA KALTENG**
BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 25

SPRINT MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLDA KALTENG



BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Akhlas Melayani, Tulus Melindungi



REPOBLIK INDONESIA, KABUPATEN KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH, KABUPATEN KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKA, 15 OKTOBER 2024

DAFTAR SUSUNAN TIM SUPERVISI FUNGSI SEM BERTA SOSIALISASI HASIL PELAKSANAAN BAKORDEM SDM DAN POLRI POLRI, 2024 KE JAJARAN POLDA KALTENG

NO	NAMA	PANGKA	JABATAN	KEY
1	LEO S. N. SIMA TUPANG, S.I.K.	KOMBES POL/7427878	KARID SDM POLDA KALTENG	KEPALA TIM
2	JARDY BUDY PURNOMO, S.Pd, M.Pd, S.H.	KOMPOL/7888983	KASAB/SP/POHLOGI RO SDM POLDA KALTENG	KETUA TIM
3	MUHI FADHOLAH, S.H.	KOMPOL/7888918	KASAB/AG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
4	ENDU BUDI UTOMO, S.H.	PEMBAWA/19710622003171001	PL. PALU SUBBAG/SP/POHLOGI RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
5	BURHENDI, A. M. S. P.	PERUSAHA/19710622003171004	PL. PALU SUBBAG/AG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
6	AFFRIANDI ARIS PRATAMA	BRIGPOL/8888927	SAMBA/II/BERBAG/SP/POHLOGI RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
7	ERWIN YUSUF HABIBAN, S.H., S.K.M, S.H.	KOMPOL/8889188	KASAB/KA/BERKOR MAGDAL PERSE	KETUA TIM
8	PRIO AMBONO, S.T.	PTUPOL/7414	PAUR SUPER/BERKOR MAGDAL PERSE	KETUA TIM

LAMPIRAN AL BERTAS KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH, 15 OKTOBER 2024

1	2	3	4	5
9	DWI BASONGIO, S.H., M.Pd.	PTUPOL/10103	PL. PALU SUBBAG/SP/POHLOGI RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
10	RAHAYU YOGA MULIA, S.H.	IPOL/100003	PAWAS/II/SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
11	DANANIE STEPHENUS	BRIGPOL/8888980	SAMBA/II/SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
TIM SIRAYAN IV				
12	D. NABO SANTOSO, S.H., S.H.	AKRIPOL/8888408	KASAB/BERKOR RO SDM POLDA KALTENG	KETUA TIM
13	JOHANN DAVIDSON, M.Pd.	KOMPOL/77100074	KASAB/AG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
14	DEWIYATI PRADISTA PUTRI, S.T.	PTUPOL/10084	PL. PALU SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
15	STEPHANUS ELASTONHO SANGOTO, S.H., M.Pd.	IPDA/88891818	PL. PALU SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
16	YUDI PRASETYO P., S.KM.	BRIPOL/111019	SAMBA/II/SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
TIM SIRAYAN V				
17	SAMUDER, S.Pd., S.H., M.M.	AKRIPOL/10084	KASAB/KA/BERKOR	KETUA TIM
18	SUPRATNO, S.H.	KOMPOL/7410087	KASAB/AG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA

LAMPIRAN AL BERTAS KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH, 15 OKTOBER 2024

1	2	3	4	5
19	SATRIANI HARAFANDI, S.H.	PTUPOL/1005842	PL. PALU SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
20	AUSTI ASTRI RICHANTI DWI YANINDA, S.H.	PTUPOL/1005833	PL. PALU SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA
21	ZELIN MALLANA, S.Sa.	BRIGPOL/8888927	SAMBA/II/SUBBAG/UMUM RO SDM POLDA KALTENG	ANGGOTA

LAMPIRAN AL BERTAS KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH, 15 OKTOBER 2024

PERLEKALAN TUGAS TIM SUPERVISI FUNGSI SEM BERTA SOSIALISASI HASIL PELAKSANAAN BAKORDEM SDM DAN POLRI POLRI, 2024 KE JAJARAN POLDA KALTENG

NO	PEKERJA	TUGAS
1	LEO S. N. SIMA TUPANG, S.I.K.	KEPALA TIM
2	JARDY BUDY PURNOMO, S.Pd, M.Pd, S.H.	KETUA TIM
3	MUHI FADHOLAH, S.H.	ANGGOTA TIM

SPRINT MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLRES JAJARAN DAN POLDA KALTENG



SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG



GAMBAR 26

SPRINT PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP



BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Akhlas Melayani, Tulus Melindungi









SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA DAN POLRES JAJARAN POLDA KALTENG



SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG



GAMBAR 27

PELAKSANAAN SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA KALTENG DAN JAJARAN POLRES POLDA KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Ahklas Melayani, Tulus Melindungi

ABSENSI PANITIA RAKORSEN SDM DAN PNS POLRI TA. 2024 POLDA KALIMANTAN TENGAH
HARI SELASA, 5 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	FANGSI/KEP	JABATAN	TTD
1	LEO SURYA HUGANHA SIMATUPANG, S.I.K.	KOMPOL/760070	KARO SDM POLDA KALTENG	
2	DONI HADI SANTOSO, S.I.K, M.H.	ASBP/090548	KABAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	
3	ZANUSON, S.Pc, E.E.C, M.H.	ASBP/932874	KABAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	
4	JAYOT BERT PURNOMO, S.Pc, M.H., M.Pd	KOMPOL/7600103	PIE KAMAGPI RD SDM POLDA KALTENG	
5	SUPRPTO, S.H.	KOMPOL/7410057	KASUBBAGKAMPITEN BAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	
6	MUKI FACHRUL, S.H.	KOMPOL/7600214	KASUBBAGREKAMIN RD SDM POLDA KALTENG	
7	ICHWAN CAHYONO, S.Pc, M.Pd	KOMPOL/7600574	KASUBBAGSPEKPERI BAGPI RD SDM POLDA KALTENG	
8	BRUNI TOGAR SUWAN RTUMONGKI, S.H., S.I.K, M.H.	KOMPOL/8602196	KASUBBAGSELEK BAGDALPERI RD SDM POLDA KALTENG	
9	RUAMA MARGARETHA PASARIBU	APPI/7600110	KASUBBAGPANGKAT BAGSISKR RD SDM POLDA KALTENG	

NO	NAMA	FANGSI/KEP	JABATAN	TTD
10	NEDY AUSTINA AP	BRIPOL/8600880	PIB PAMBI 4 SUBSUSJENHANS BID THK POLDA KALTENG	
11	ANDRY ARDIANSIHMAN	BRIPOL/8610086	SAMIN BID THK POLDA KALTENG	
12	BENI SATRIAWAN	BRIPOL/8610086	SAMIN BID THK POLDA KALTENG	
13	KATEMI	ASBP/0701086	PIBIL LEMBAGA 3 SUBSUSJENHANS BAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	
14	ANDE HA PURISA	IPD/0800104	PIB KANTOR 1 SUBSUSJENHANS BAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	
15	ELUWAMAH HADI WISNWO	ASBP/0701086	PIB PAMBI 3 KANTOR 1 SUBSUSJENHANS BAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	

Dibuatkan di : Pangkajene, 5 November 2024

 KEPALA SDM
 POLDA KALIMANTAN TENGAH
 POLRES TAP/1670776

NOTULEN

Hari, tanggal : SELASA, 5 NOVEMBER 2024
 Waktu : 09.00 WIB - 3.0 SEORANG
 Tempat : ALMA AZHA DEPAH
 Pemimpin rapat : --
 Jumlah peserta : 17
 Materi rapat : Pelaksanaan pemorbin dan menyempatkan meeting ANEX di bag SDM.

Hasil Rapat :
 - paparan RAKORSEN
 - pembahasan RAKORSEN yang dibina oleh
 - KAPOLDA KALTENG 6
 - Laporan Koro SDM
 - Pembahasan YAKO KASAS dimulai dan kabag binar, kabag walper, kabag diopers, kabag pin, dan kabag pris.
 - Sesi akhir berakhir.

PIRANOKA RAN 9 orang dan

 M. HARIK ACI
 BRIPAN NPP 02010160

DAFTAR HADIR DAN NOTULEN SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA DAN POLRES JAJARAN POLDA KALTENG

SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG
 BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 28

DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN SOSIALISASI PERUMAHAN KEPADA PNPP POLDA KALTENG DAN JAJARAN POLRES POLDA KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Ahklas Melayani, Tulus Melindungi

DAFTAR HADIR
 PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLRES KOTIM, SERUYAN DAN KATINGAN POLDA KALTENG
 HARI SELASA, 5 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	FANGSI/KEP	JABATAN	LOKASI	TTD
1	Harik Aci	ASBP/090548	KABAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	KOTIM	
2	Andri Ardiansihman	BRIPOL/8610086	SAMIN BID THK POLDA KALTENG	SERUYAN	
3	Beni Satriawan	BRIPOL/8610086	SAMIN BID THK POLDA KALTENG	KATINGAN	
4	Kate mi	ASBP/0701086	PIBIL LEMBAGA 3 SUBSUSJENHANS BAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	KOTIM	
5	Ande Ha Purisa	IPD/0800104	PIB KANTOR 1 SUBSUSJENHANS BAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	SERUYAN	
6	Eluwamah Hadi Wisnwo	ASBP/0701086	PIB PAMBI 3 KANTOR 1 SUBSUSJENHANS BAGHANSKR RD SDM POLDA KALTENG	KATINGAN	

Dibuatkan di : Pangkajene, 5 November 2024

 KEPALA SDM
 POLDA KALIMANTAN TENGAH
 POLRES TAP/1670776

NOTULEN

Hari, tanggal : SELASA, 5 NOVEMBER 2024
 Waktu : 09.00 WIB - 3.0 SEORANG
 Tempat : ALMA AZHA DEPAH
 Pemimpin rapat : --
 Jumlah peserta : 17
 Materi rapat : Pelaksanaan pemorbin dan menyempatkan meeting ANEX di bag SDM.

Hasil Rapat :
 - paparan RAKORSEN
 - pembahasan RAKORSEN yang dibina oleh
 - KAPOLDA KALTENG 6
 - Laporan Koro SDM
 - Pembahasan YAKO KASAS dimulai dan kabag binar, kabag walper, kabag diopers, kabag pin, dan kabag pris.
 - Sesi akhir berakhir.

PIRANOKA RAN 9 orang dan

 M. HARIK ACI
 BRIPAN NPP 02010160

TIM 1 / RAYON I MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP POLRES KOTIM, SERUYAN DAN KATINGAN POLDA KALTENG

SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG
 BIRO SDM POLDA KALTENG

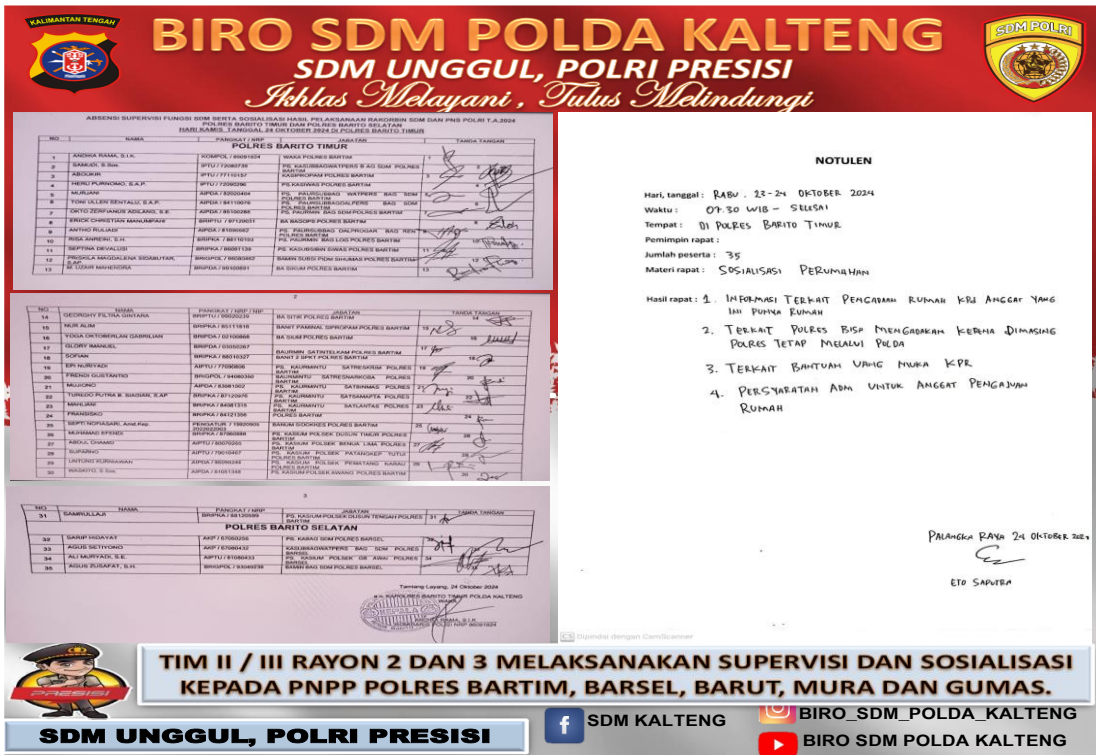
GAMBAR 29

PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM 1 / RAYON I (POLRES KOTIM, POLRES KATINGAN DAN POLRES SERUYAN)



GAMBAR 30

PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM II / III RAYON 2 DAN 3 (POLRES BARTIM, BARSEL, BARUT, MURA DAN GUMAS)



GAMBAR 31

DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI DAN SOSIALISASIPERUMAHAN

BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Akhlas Melayani, Tulus Melindungi

NO	NAMA	PANGKAT / JAB	KELOMPOK	TANGGA
1	ANDIKA HUSAIN, S.T.K.	SAKIPOL / 78000000	WAKIL POLRES BARTIM	1
2	SAMUDRI, S. Sani	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	2
3	ABDULHAK	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	3
4	HERIWI PURNOMO, S.T.K.	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	4
5	NUURMAN	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	5
6	YUNI ALBERT BENTALE, S.T.K.	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	6
7	SAHYUNDIRA HUSAINI, S.E.	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	7
8	BRICKY CHRISTIAN MANUJANGA	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	8
9	ARTHA POLRIAN	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	9
10	ANAS PURNAMA, S.T.K.	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	10
11	RIFFA RAHMAN	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	11
12	RIFFA RAHMAN	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	12
13	RIFFA RAHMAN	SAKIPOL / 78000000	PEKAWAN POLRES BARTIM	13

NOTULEN

Hari, tanggal: RABU, 23-24 OKTOBER 2024

Waktu: 09:30 WIB - SELASA

Tempat: DI POLRES BARTIM TIMUR

Pemimpin rapat: ...

Jumlah peserta: 35

Materi rapat: SOSIALISASI PERUMAHAN

Hasil rapat: 1. INFORMASI TERKAIT PENGAMBILAN RUMAH KEBANGKITAN YANG INI PUNA RUMAH
 2. TERKAIT POLRES BISA MENGURANGI KERBA DIMASING POLRES TETAP MELALUI PEDA
 3. TERKAIT BANTUAN UANG MURAH KEP
 4. PERSYARATAN ABM UNTUK ANGGAT PENGAMBILAN RUMAH

PALANGKA RAYA 24 OKTOBER 2024
 ETO SAWIRA

NO	NAMA	PANGKAT / JAB	KELOMPOK	TANGGA
14	SEDIHNYA FELIXA GUNAWAN	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	14
15	BARAKAT	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	15
16	YUSUF ANDRIANUS GABRIELIAN	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	16
17	DEDIRY MANUEL	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	17
18	SOPIAN	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	18
19	REN NURVANDY	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	19
20	FRENDO GUYANTHO	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	20
21	MUSLIMAH	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	21
22	YUSUF ANDRIANUS GABRIELIAN	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	22
23	FRANSISCO	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	23
24	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	24
25	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	25
26	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	26
27	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	27
28	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	28
29	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	29
30	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	30

NOTULEN

Hari, tanggal: RABU, 23-24 OKTOBER 2024

Waktu: 09:30 WIB - SELASA

Tempat: DI POLRES BARTIM TIMUR

Pemimpin rapat: ...

Jumlah peserta: 35

Materi rapat: SOSIALISASI PERUMAHAN

Hasil rapat: 1. INFORMASI TERKAIT PENGAMBILAN RUMAH KEBANGKITAN YANG INI PUNA RUMAH
 2. TERKAIT POLRES BISA MENGURANGI KERBA DIMASING POLRES TETAP MELALUI PEDA
 3. TERKAIT BANTUAN UANG MURAH KEP
 4. PERSYARATAN ABM UNTUK ANGGAT PENGAMBILAN RUMAH

PALANGKA RAYA 24 OKTOBER 2024
 ETO SAWIRA

NO	NAMA	PANGKAT / JAB	KELOMPOK	TANGGA
31	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	31
32	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	32
33	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	33
34	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	34
35	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	SAKIPOL / 78000000	35

NOTULEN

Hari, tanggal: RABU, 23-24 OKTOBER 2024

Waktu: 09:30 WIB - SELASA

Tempat: DI POLRES BARTIM TIMUR

Pemimpin rapat: ...

Jumlah peserta: 35

Materi rapat: SOSIALISASI PERUMAHAN

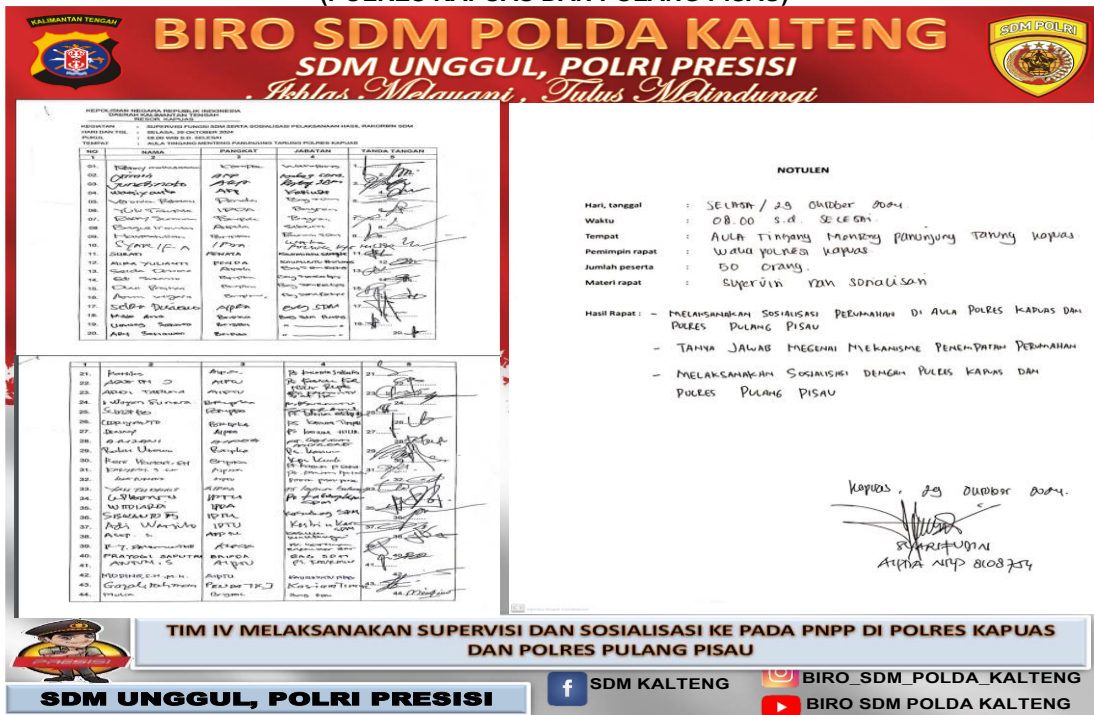
Hasil rapat: 1. INFORMASI TERKAIT PENGAMBILAN RUMAH KEBANGKITAN YANG INI PUNA RUMAH
 2. TERKAIT POLRES BISA MENGURANGI KERBA DIMASING POLRES TETAP MELALUI PEDA
 3. TERKAIT BANTUAN UANG MURAH KEP
 4. PERSYARATAN ABM UNTUK ANGGAT PENGAMBILAN RUMAH

PALANGKA RAYA 24 OKTOBER 2024
 ETO SAWIRA



GAMBAR 32

PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM IV RAYON 4 (POLRES KAPUAS DAN PULANG PISAU)



GAMBAR 33

DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI PERUMAHAN



TIM V MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KE PADA PNPP DI POLRES KOBAR, POLRES LAMANDAU DAN POLRES SUKAMARA

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 34

PELAKSANAAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KEPADA PNPP OLEH TIM V RAYON 5 (POLRES KOBAR, POLRES LAMANDAU DAN POLRES SUKAMARA)



TIM V MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI KE PADA PNPP DI POLRES KOBAR, POLRES LAMANDAU DAN POLRES SUKAMARA

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 35

DAFTAR HADIR DAN NOTULEN PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI DAN SOSIALISASI PERUMAHAN

g. Capaian Milestone 7: Melaksanakan Koordinasi dan Kolaborasi dengan stakeholder dalam penyusunan Draf PKS. Tujuannya adalah Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam penyusunan Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan langkah penting untuk memastikan semua pihak terlibat dan memiliki pemahaman yang sama. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Identifikasi Stakeholder

Tentukan pihak-pihak yang terlibat: Identifikasi semua stakeholder terkait, seperti instansi pemerintah, lembaga swasta, dan komunitas lokal.

2. Rencanakan Pertemuan

Jadwalkan pertemuan: Atur waktu dan tempat untuk pertemuan awal dengan semua stakeholder. Pertemuan ini dapat dilakukan secara langsung atau daring.

3. Diskusi Awal

Sampaikan tujuan: Jelaskan tujuan dari penyusunan Draf PKS dan pentingnya partisipasi semua pihak. Kumpulkan masukan: Ajak stakeholder untuk memberikan masukan dan ide-ide yang relevan.

4. Penyusunan Draf Awal

Rangkum hasil diskusi: Buatlah draf awal berdasarkan masukan yang telah dikumpulkan. Pastikan untuk mencakup semua aspek penting.

5. Tindak Lanjut

Kirimkan draf kepada stakeholder: Bagikan draf awal kepada semua pihak untuk mendapatkan umpan balik. Jadwalkan pertemuan lanjutan: Adakan pertemuan untuk membahas draf dan melakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima.

6. Finalisasi Draf PKS

Revisi draf: Lakukan revisi akhir berdasarkan diskusi terakhir. Persiapkan dokumen final: Siapkan dokumen final PKS untuk ditandatangani oleh semua pihak.

7. Monitoring dan Evaluasi

Tetapkan mekanisme evaluasi: Buat rencana untuk memantau pelaksanaan PKS dan evaluasi berkala untuk memastikan tujuan tercapai.

8. Dokumentasi

Catat semua proses: Simpan semua catatan dan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan PKS untuk referensi di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan proses penyusunan Draf PKS dapat berjalan lancar dan melibatkan semua stakeholder secara efektif.



GAMBAR 36

RAPAT DGN MENTOR DAN TIM EFEKTIF DLM MENYUSUN DRAF PKS PERUMAHAN

- h. **Capaian Milestone 8:** Melaksanakan Survey Lokasi penyediaan Perumahan oleh Developer/Pengembang. Melaksanakan survei lokasi untuk penyediaan perumahan oleh developer atau pengembang adalah langkah penting untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil antara lain, Tentukan Kriteria Lokasi dengan membuat daftar kriteria yang harus

dipenuhi oleh lokasi, seperti aksesibilitas, infrastruktur, keamanan, dan potensi pasar, Identifikasi Tim Survei dalam Bentuk tim yang terdiri dari ahli yang relevan, seperti arsitek, perencana kota, dan ahli lingkungan, Kumpulkan Data Sekunder melakukan riset awal menggunakan data sekunder tentang lokasi, termasuk peta, statistik demografi, dan informasi infrastruktur, Tinjau Kebijakan dan Regulasi dengan Pastikan lokasi yang dipilih mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah setempat. Pelaksanaan Survei, Kunjungan Lapangan dengan melakukan survei langsung ke lokasi yang dipilih. Amati kondisi fisik, akses transportasi, dan lingkungan sekitar, Jika memungkinkan, lakukan wawancara dengan masyarakat sekitar atau pihak terkait untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, melaksanakan Analisis data yang dikumpulkan dari survei lapangan dan diskusi. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing Lokasi, membuat Laporan Dokumentasikan hasil survei dalam bentuk laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi.

Dengan langkah-langkah ini, survei lokasi untuk penyediaan perumahan oleh developer atau pengembang dapat dilaksanakan dengan efektif, meminimalkan risiko, dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek.



GAMBAR 37

SURVEY LOKASI PERUMAHAN YANG AKAN DIBANGUN OLEH
PARA PENGEMBANG/DEVELOPER




GAMBAR 38

LOKASI PERUMAHAN YANG AKAN DIBANGUN OLEH PARA PENGEMBANG / DEVELOPER

- i. **Capaian Milestone 9:** Melaksanakan sinkronisasi PKS dengan Kerma Biro Ops, Bidkum dan Setum Polda Kalteng (berkaitan dgn Bahasa Hukum dan Tata Naskah) dengan mempersiapkan Dokumen serta Pastikan draf PKS sudah direvisi berdasarkan masukan terakhir dari semua Peserta Rapat dan telah disetujui, adanya format yang jelas menggunakan format yang jelas dan profesional untuk dokumen, dengan bagian-bagian yang terstruktur (judul, latar belakang, tujuan, pasal-pasal, tanda tangan, dll.). Presentasi Draft PKS, Sampaikan Ringkasan dan ringkasan singkat tentang draf PKS, termasuk latar belakang, tujuan, dan manfaat Kerjasama, menjelaskan Pasal-Pasal Penting, Soroti pasal-pasal penting yang perlu diperhatikan, seperti tanggung jawab masing-masing pihak, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Berikan kesempatan bagi peserta Rapat untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap draf yang disajikan. Sampaikan rencana tindak lanjut setelah penandatanganan, termasuk timeline pelaksanaan dan mekanisme monitoring.


Dengan langkah-langkah ini, penyajian draf PKS yang sudah disepakati oleh Peserta Rapat dapat dilakukan dengan baik, memastikan semua pihak memahami perjanjian dan siap untuk melaksanakan kerjasama yang telah disepakati.



BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Akhlak Melayani, Tulus Melindungi



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS
Nomor: BND-4631- /WKEP/2024/R6 SDM

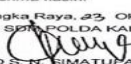
Kepada : Yth. 1. Karoops Polda Kalteng
2. Kabidkum Polda Kalteng
3. Kasetum Polda Kalteng

Dari : Karo SDM Polda Kalteng

Hal : sinkronisasi draft PKS perumahan.


1. Rujukan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1701/REN.2/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Susunan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Program Kapolri "Transformasi Kinerja Polri yang Presisi" khusus wilayah Polda Kalteng.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bahwa dalam rangka memberikan hak-hak anggota dan akselerasi seratus hari program Kapolri, maka pemenuhan perumahan merupakan kebutuhan yang perlu diwujudkan agar personel Polda Kalteng dapat menikmati kesejahteraannya melalui kredit perumahan.
3. Berkaitan dengan butir nomor dua di atas, bersama ini disampaikan tersebut alamatkan kiranya berkenan memerintahkan perwira Satker untuk melakukan sinkronisasi draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) perumahan antara Polda Kalteng, Bank BTN Cabang Palangka Raya, Bank BRI Cab. Palangka Raya, developer PT Kahin Berkah Mandiri dan PT Chara Kayu Manis mengenai pembangunan dan pembiayaan kredit perumahan bersubsidi bagi personel Polda Kalteng yang akan dilaksanakan pada:
 - a. hari, tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024;
 - b. pukul : 14.00 WIB;
 - c. tempat : ruang Bagwatpers Ro SDM Polda Kalteng.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 23 Oktober 2024
KEPALA BIRO SDM POLDA KALIMANTAN TENGAH



 LEO S. N. RIMATUNANG, S.I.K.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070770


Tembusan:

1. Kapolda Kalteng
2. Irwasda Polda Kalteng
3. Karolog Polda Kalteng
4. Kabidpropam Polda Kalteng



**NOTA DINAS SINGKRONISASI DRAF PKS DENGAN SATKER YANG TERKAIT
DI BIRO SDM POLDA KALTENG**


 SDM KALTENG


 BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

SDM KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 39

NOTA DINAS SINGKRONISASI DRAF PKS DGN SATKER TERKAIT



SINGKRONISASI DENGAN SATKER BAG KERMA OPS, BIDKUM, DAN SETUM POLDA KALTENG TERKAIT PKS PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI



SDM KALTENG



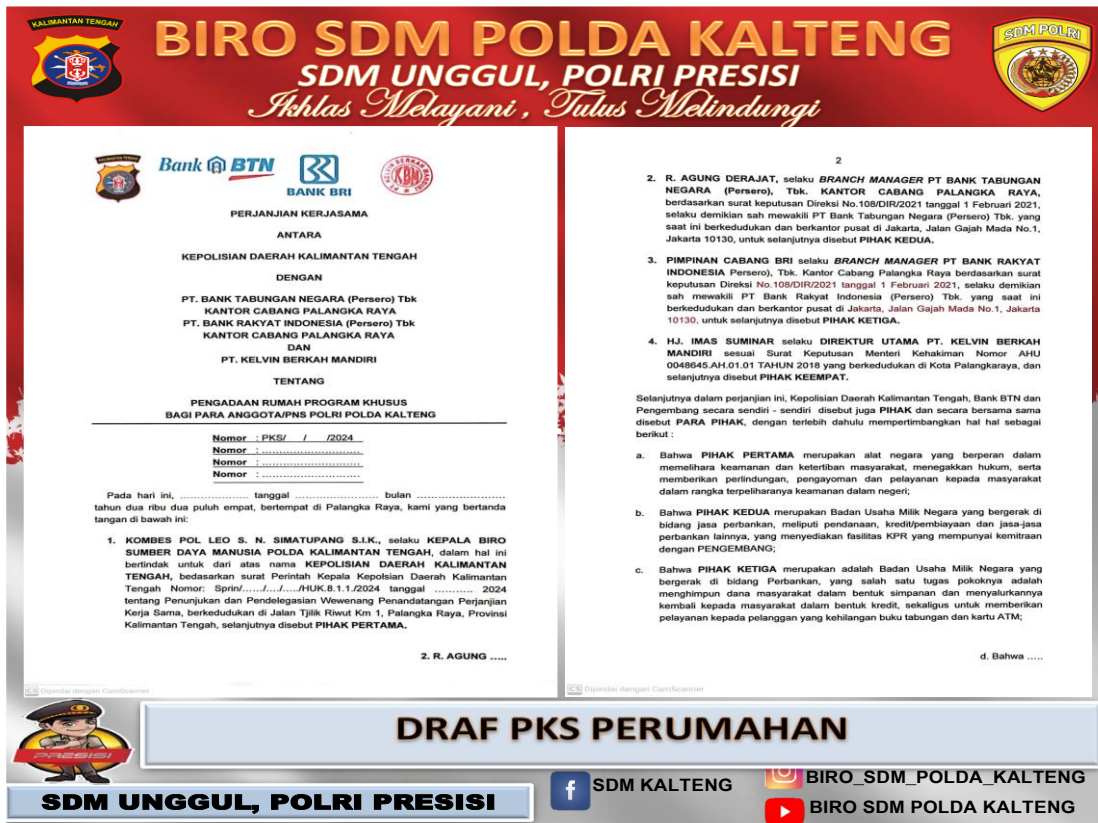
BIRO_SDM_POLDA_KALTENG



BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 40

SINGKRONISASI DENGAN SATKER TERKAIT PKS PERUMAHAN



DRAF PKS PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI



SDM KALTENG



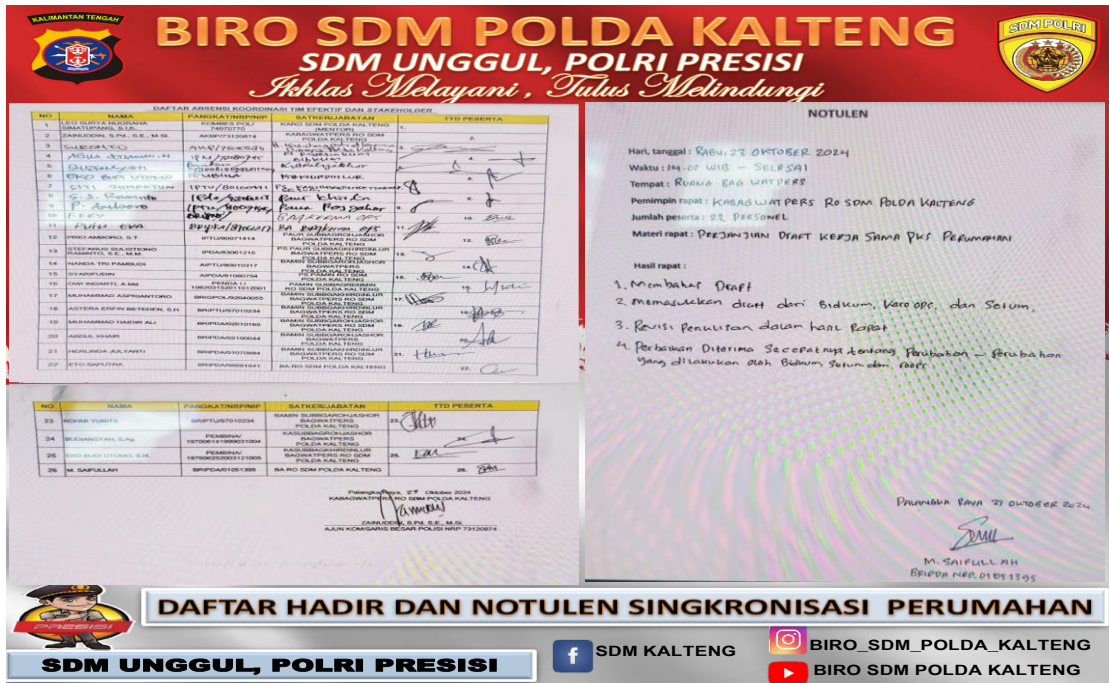
BIRO_SDM_POLDA_KALTENG



BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 41

DRAF PKS PERUMAHAN



GAMBAR 42

DAFTAR HADIR DAN NOTULEN SINGKRONISASI DGN STAFF BAG KERMA RO OPS, BIDKUM DAN SETUM POLDA KALTENG

j. **Capaian Milestone 10:** Melakukan **Brand Market** atau **Study Banding** ke PUPR untuk mengetahui kegiatan Penyediaan Perumahan dengan melakukan brand market ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengetahui kegiatan penyediaan perumahan adalah langkah strategis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

- **Identifikasi Tujuan** Tentukan tujuan spesifik dari *brand market*, seperti mengetahui program penyediaan perumahan yang sedang berjalan, kebijakan terbaru, atau peluang Kerjasama dan Kumpulkan Data Awal Lakukan riset awal mengenai kebijakan dan program yang telah dikeluarkan oleh PUPR terkait penyediaan perumahan.
- **Pilihan Metode:** Tentukan metode yang akan digunakan untuk melakukan brand market, seperti: Pertemuan langsung Mengadakan pertemuan dengan pihak PUPR. Mengikuti acara yang diadakan oleh PUPR serta Pengumpulan informasi secara daring: Mengakses informasi dari situs web resmi dan publikasi PUPR dan Jalin Kerjasama dengan PUPR berdasarkan informasi yang diperoleh. Monitor Perkembangan dan Tetap terhubung dengan PUPR untuk mengikuti perkembangan program dan kebijakan penyediaan perumahan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, brand market ke PUPR dapat dilakukan secara efektif, memberikan wawasan berharga tentang kegiatan penyediaan perumahan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan strategis.



BIRO SDM POLDA KALTENG
SDM UNGGUL, POLRI PRESISI
Ahklas Melayani, Tulus Melindungi





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya 73112

Nomor : B/ 5063 /X/HUM./2024/Iro SDM
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Koordinasi

Palangka Raya, 15 Oktober 2024

Kepada
Yth. PUPR
di
Palangka Raya

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang pemberian penghargaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP), Polda Kalteng memfasilitasi pengadaan perumahan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar dimaksud guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polda Kalteng.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat permohonan koordinasi dalam pengadaan dan pembiayaan perumahan bagi personel Polda Kalteng yang selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
KARO SDM



KEPALA KARO SDM
KEMENTERIAN BESAR POLISI NRP 74070770

Tembusan:

1. Kapolda Kalteng.
2. Irwasda Polda Kalteng.
3. Kabidpropam Polda Kalteng.

**SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DGN PUPR
PROVINSI KALTENG TERKAIT PERUMAHAN**



SDM UNGGUL, POLRI PRESISI



SDM KALTENG



BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 43
SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DENGAN PUPR PROV. KALTENG



BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Ahklas Melayani, Tulus Melindungi





NOTULEN

Hari, tanggal : Kamis / 17 Okt 2024
 Waktu : 09.00
 Tempat : Aula PUPR
 Pemimpin rapat : Kabag wat Pers dan Kabid TV
 Jumlah peserta : 5 Personel
 Materi rapat :

Hasil rapat :

- Menekankan Timbong Perumahan
- Bagaimana mekanisme Pembangunan Perumahan Oleh PUPR
- Pembangunan Blokasi Tanah yang memiliki Legalitas yang jelas
- pembangunan dalam jumlah yang besar
- Sistem Pemukiman Selama 2 Tahun
- Selain itu dapat ditambahkan ke instansi tersebut.

Pasarba Raja, 17 Okt 2024

 M. Ridwan Baranawi

MELAKSANAKAN BREAD MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN PUPR TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI  **SDM KALTENG**  **BIRO SDM POLDA KALTENG**
 **BIRO SDM POLDA KALTENG**

GAMBAR 44
MELAKSANAKAN BREAD MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN PUPR



BIRO SDM POLDA KALTENG

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI

Ahklas Melayani, Tulus Melindungi



KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KALIMANTAN TENGAH
 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR ABSENSI KOORDINASI TIM EFEKTIF DAN STAKEHOLDER

NO	NAMA	PANGKAT/NIP/NPNP	SATKER/JABATAN	TTD PESERTA
1	LEO SURYA NUGRAHA	KOMRIS POLJ 1701773	KABAG SDM POLDA KALTENG	1.
2	ZAMKUDIN, S.Pi, S.E., M.Si	AKBP/73120874	KABAG/KA PERS RO SDM POLDA KALTENG	2.
3	ANALISIS NUT	-	Kontribusi Tim Umum	3.
4	JORDI YULIANTORO, S.H., M.M	AKP/200191	Kontribusi Perumahan	4.
5	STEFANUS SULISTIONO	IP/040301215	PAJUB SUBSANGKASUDOR	5.
6	HANDA TRI PANGSIDI	AFTU/03012157	BAGHATPERS RO SDM POLDA KALTENG	6.
7	DIANERILION	AP/040108104	SAKAM	7.
8	DANI INDARTI, A.ME	31000103010001	SAKAM	8.
9	MUHAMMAD ASPRIANTORO	BR/0402040055	SAKAM	9.
10	AESTERA EFIN BIREDEK, S.H	BR/PTU/0101024	SAKAM	10.
11	MUHAMMAD HADIR ALI	BR/POA/02010160	SAKAM	11.
12	ADUL KHAR	BR/POA/0210004	SAKAM	12.
13	HERLINDA ALLYANTI	BR/POA/1070884	SAKAM	13.
14	ITO SAPUTRA	BR/POA/0801941	SAKAM	14.
15	ROHM YUNTA	BR/PTU/0101024	SAKAM	15.
16	BUDIANUSYAH, S.Ag	1970040100001004	SAKAM	16.
17	DIO BUDI UTOMO, S.H	PEMBINA/1970040100001004	SAKAM	17.
18	M. SAFULLAH	BR/POA/0101205	SAKAM	18.

Pasarba Raja, 17 Oktober 2024
 KABAG/KA PERS RO SDM POLDA KALTENG

 ZAMKUDIN, S.Pi, S.E., M.Si
 AUM KOMSARIS BEKAS POLRES NPP 7312074



MELAKSANAKAN BREAD MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN PUPR TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI  **SDM KALTENG**  **BIRO SDM POLDA KALTENG**
 **BIRO SDM POLDA KALTENG**

GAMBAR 45
MELAKSANAKAN BREAD MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN PUPR PROV. KALTENG

k. Capaian Milestone 11 : Studi banding adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih entitas, konsep, atau sistem dengan TNI tujuan untuk memahami perbedaan, kesamaan, dan praktik terbaik di antara TNI dan Polri. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, manajemen, kebijakan publik, dan penelitian sosial. Study Banding ini dilakukan dengan rekan TNI berkaitan dengan pengadaan Perumahan yang dilakukan Berikut adalah beberapa poin penting mengenai studi banding:

1. **Tujuan:** Untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari subjek yang dibandingkan, serta untuk mencari solusi atau inovasi baru. Bahwa dalam pengadaan perumahan yang dilakukan oleh rekan TNI dengan memanfaatkan TWP (Tabungan Wajib Prajurit) yang digunakan untuk sebagai Uang Muka dalam pengambilan Rumah.
2. **Metode:** Studi banding dapat dilakukan melalui analisis kualitatif atau kuantitatif, survei, wawancara, dan pengumpulan data lainnya.
3. **Hasil:** Studi banding sering kali menghasilkan rekomendasi atau strategi baru yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi.

Dengan demikian, studi banding merupakan alat penting untuk belajar dari pengalaman dengan TNI dan meningkatkan praktik dalam berbagai konteks.

BIRO SDM POLDA KALTENG
SDM UNGGUL, POLRI PRESISI
Ahklas Melayani . Tulus Melindungi


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KALIMANTAN TENGAH
 Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 16 Oktober 2024

Nomor : B/ 3064/DHUM/2024/Ro SDM
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Koordinasi




Kepada
 Yth. KOREM 102/PANJU PANJUNG
 di
 Palangka Raya

1. Rujukan:
 a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 b. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang pemberian penghargaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP), Polda Kalteng memfasilitasi pengadaan perumahan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar dimaksud guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polda Kalteng.
 3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat permohonan koordinasi dalam pengadaan dan pembiayaan perumahan bagi personel Polda Kalteng yang selanjutnya dapat diuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
 KARO SDM

 KEPALA KARO SDM
 MATUWANG, S.I.K
 NRP POLISI NRP 74070770

Tembusan:
 1. Kapolda Kalteng.
 2. Iwaska Polda Kalteng.
 3. Kabidpropam Polda Kalteng.

SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DGN KOREM 102 / PANJU PANJUNG PALANGKARAYA TERKAIT PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI |  SDM KALTENG |  BIRO_SDM_POLDA_KALTENG |  BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 46
SURAT PEMBERITAHUAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DENGAN KOREM 102/PANJU PANJUNG KALTENG

BIRO SDM POLDA KALTENG
SDM UNGGUL, POLRI PRESISI
Ahklas Melayani . Tulus Melindungi



MELAKSANAKAN BREAND MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN TNI TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN

SDM UNGGUL, POLRI PRESISI |  SDM KALTENG |  BIRO_SDM_POLDA_KALTENG |  BIRO SDM POLDA KALTENG

GAMBAR 47
MELAKSANAKAN BREAND MARKET ATAU STUDY BANDING DENGAN KOREM 102 / PANJU PANJUNG KALTENG

5. Penyusunan Ulang: Menyusun ulang dokumen PKS yang sudah disinkronisasi untuk mencerminkan kesepakatan akhir.
6. Verifikasi: Memastikan bahwa semua pihak telah membaca dan memahami isi PKS yang telah disinkronisasi sebelum ditandatangani.
7. Monitoring dan Evaluasi: Setelah PKS ditandatangani, melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan implementasi sesuai dengan kesepakatan.

Pentingnya Singkronisasi PKS:

- **Meminimalkan Risiko:** Dengan adanya keselarasan dan pemahaman yang jelas, risiko terjadinya kesalahpahaman dan konflik dapat diminimalkan.
- **Meningkatkan Efisiensi:** Proses yang terkoordinasi baik akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek yang diatur dalam PKS.
- **Membangun Kepercayaan:** Singkronisasi menciptakan lingkungan yang transparan, yang pada gilirannya membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.
- **Penguatan Komitmen:** Ketika semua pihak terlibat dalam proses singkronisasi, komitmen terhadap kesepakatan menjadi lebih kuat.

Dengan demikian, singkronisasi PKS adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kerjasama yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.



GAMBAR 49

SURAT PEMBERITAHUAN SINGKRONISASI DRAF PKS DENGAN STAKEHOLDER



GAMBAR 50

SINGKRONISASI DENGAN STAKEHOLDER TTG DRAF PKS PERUMAHAN

11. Capaian Milestone 13 : Menyajikan Draf PKS yang sudah disepakati oleh Stakeholder Penyajian Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah proses penyampaian dan pengorganisasian isi perjanjian tersebut sehingga mudah dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa langkah dan tips untuk penyajian PKS yang efektif, Setelah penyajian, tindak lanjuti dengan komunikasi untuk memastikan semua pihak siap untuk melaksanakan kesepakatan.

Dengan penyajian yang baik, PKS tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat komunikasi yang efektif yang mendukung kerjasama yang produktif.



GAMBAR 51
DUKUNGAN KAPOLDA KALTENG DALAM PROYEK PERUBAHAN YANG TELAH DIBUAT



GAMBAR 52
DUKUNGAN KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH DALAM PROYEK PERUBAHAN



GAMBAR 53

PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN KARO SDM POLDA KALIMANTAN TENGAH



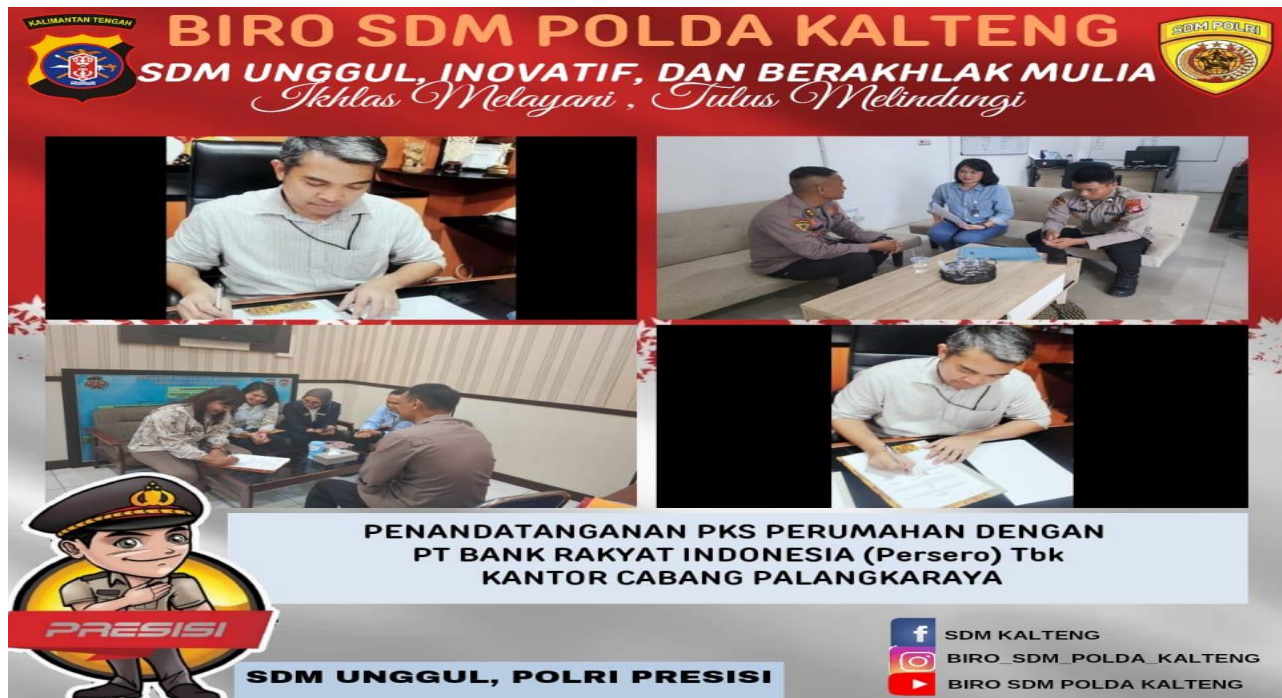
GAMBAR 54

PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. KELVIN BERKAH MANDIRI PALANGKARAYA



GAMBAR 55

PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR CABANG PALANGKARAYA



GAMBAR 56

PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) PALANGKARAYA



GAMBAR 57

PENANDATANGANAN PKS PERUMAHAN DENGAN PT. GRAHA ASRAWI MEMBANGUN (Persero)
PALANGKARAYA

B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Dalam pembinaan melalui Arahan Karo SDM selaku Mentor Polda Kalteng dalam Strategi Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda Kalteng dilakukan dengan menggunakan model strategi marketing mix. Secara umum strategi marketing mix merupakan sekumpulan dari beberapa variable yang dirangkai guna mengejar target pemasaran dalam sasaran dan bisa dikendalikan secara berkelanjutan. Melalui strategi ini Arahan Karo SDM Polda Kalteng semakin efektif dan tepat sasaran. Dalam melaksanakan inovasi strategi optimalisasi Strategi Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda Kalteng dan sinergitas nasional dengan memasukan beberapa komponen penting strategi marketing melalui produk, tempat, harga, promosi dan customer, Rencana strategi marketing mix terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik langkah-langkah strategi marketing yaitu dengan menggunakan 4P1C (Product, Price, Place, Promotion, Customer).

PENCAPAIAN HASIL PROYEK PERUBAHAN

Pencapaian hasil proyek perubahan Operasi Kewilayahan Yang Smarter pada tahap Jangka Pendek telah dilaksanakan seluruhnya, meliputi:

1. telah terdataan secara Online bagi PNPP yang berminat untuk memiliki Rumah;
2. Melaksanakan Sosialisasi secara terpadu bagi seluruh PNPP Polda Kalteng dan Polres Jajaran yang diselenggarakan oleh Biro SDM Polda Kalteng dan Polres jajaran di Wilayah hukum Polda Kalteng;
3. Disahkannya atau ditandatanganinya PKS atau MoU Perumahan antara Polda Kalteng dengan Bank BTN, Bank BRI, PT. Kelvin Barkah Mandiri, dan PT. Graha Asrawi Membangun Palangka Raya Propinsi Kalteng.

C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Dalam pelaksanaan proyek perubahan strategi Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda Kalimantan Tengah. secara kolaboratif tim efektif bekerja sesuai dengan kompetensi dan bimbingan atau mentoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan oleh tim efektif Untuk memahami prinsip – prinsip organisasi pembelajaran, tantangan dalam organisasi pembelajaran, dan strategi membangun organisasi pembelajaran, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya.

Sebagai learning Organization yang efektif Bag Watpers Biro SDM Polda Kalteng memenuhi dimensi sebagai berikut :

1. **Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)** dalam Proyek Perubahan ini digunakan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan kualifikasi yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi, mewujudkan peran SDM Polri yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, Manajemen SDM dapat menjadi sumber panduan yang berharga dalam merumuskan strategi dan program pengembangan SDM yang efektif. Dengan manajemen SDM yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, motivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.
2. **Diagnosa organisasi** Dalam Proyek Perubahan ini merupakan proses evaluasi dan analisis terhadap kondisi, struktur, budaya, dan proses di dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, atau peluang yang ada, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Mengumpulkan informasi melalui survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk memahami pola, kekuatan, dan kelemahan dalam organisasi. Menentukan area yang membutuhkan perhatian atau perbaikan, seperti komunikasi, kepemimpinan, atau kinerja tim. Mengusulkan strategi atau intervensi yang dapat membantu memperbaiki masalah yang diidentifikasi. Merencanakan langkah-langkah implementasi dan mengevaluasi hasil dari perubahan yang dilakukan.
Diagnosa organisasi penting untuk membantu manajemen memahami dinamika internal dan eksternal antara Polda Kalteng dengan Dinas terkait yang mempengaruhi kinerja organisasi, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis.
3. **Membina kerjasama tim** Dalam Proyek Perubahan ini adalah proses membangun, mengembangkan, dan memelihara hubungan yang efektif di antara Leader dengan anggota tim Efektif Polda Kalteng untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagai langkah dan strategi yang dapat meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan komitmen di dalam tim. Beberapa aspek penting dalam membina kerjasama tim meliputi:
Komunikasi yang Efektif: Mendorong dialog terbuka di antara anggota tim untuk berbagi ide, umpan balik, dan informasi.
Pemberian Peran yang Jelas: Menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing anggota agar semua orang memahami kontribusi mereka.
Pembangunan Kepercayaan: Menciptakan lingkungan di mana anggota tim saling menghargai dan mempercayai satu sama lain.

Pengembangan Keterampilan: Memberikan pelatihan atau sumber daya untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan resolusi konflik.

Mendorong Partisipasi: Mengajak semua anggota untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan berbagi ide.

Pujian dan Penghargaan: Mengakui dan merayakan pencapaian tim untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja.

Resolusi Konflik: Menangani perbedaan pendapat atau konflik dengan cara yang konstruktif untuk menjaga keharmonisan tim.

Dengan membina kerjasama tim yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan kerja di antara anggotanya.

D. MOBILISASI STAKEHOLDER DAN KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Mobilisasi dukungan stakeholder proyek perubahan dilakukan dalam tiga bentuk komunikasi strategis yaitu melalui kunjungan langsung sesuai agenda yang telah dirancang, optimalisasi media komunikasi (whatsapps), dan “*attachment*” atau materi rancangan proyek perubahan disampaikan kepada stakeholder melalui kegiatan tertentu.

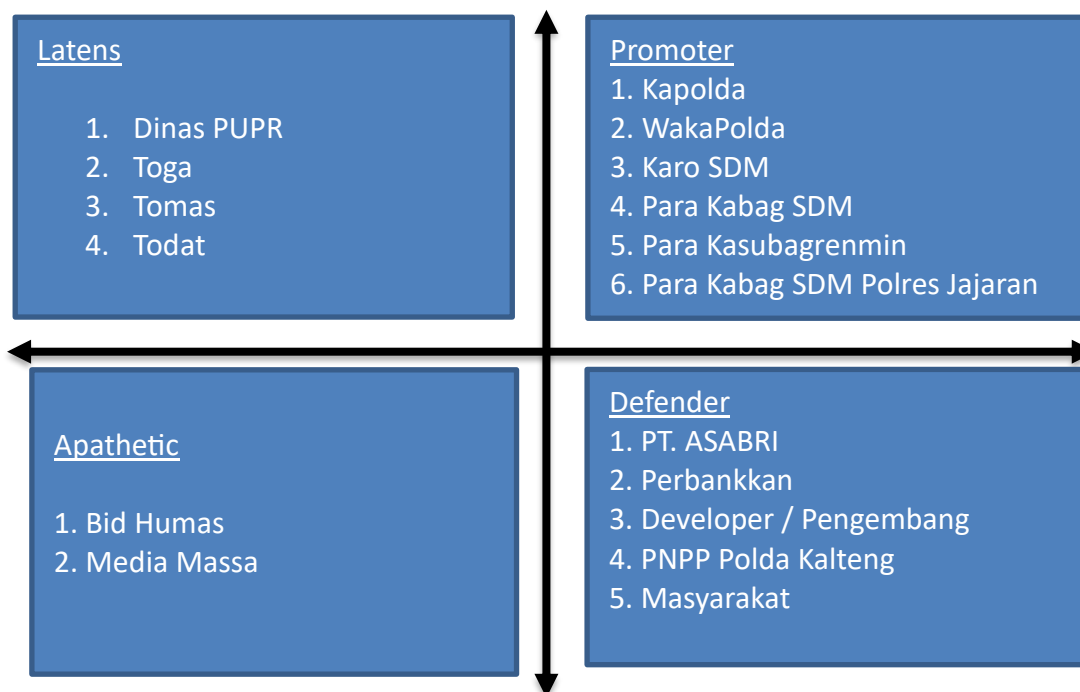
1. Gambaran perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan Gambaran perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan, antara lain sebagai berikut:

No	sebelum	Sesudah
1	Belum maksimalnya data Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda dan Polres Jajaran Polda Kalteng.	Terdatakan secara maksimal data-data Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda dan Polres Jajaran Polda Kalteng
2	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak Stakeholder	Terjalannya koordinasi Dengan baik pada pihak Stakeholder
3	Belum tersedianya pelayanan dan informasi atau Aplikasi Perumahan yang bertujuan untuk mempermudah PNPP dan masyarakat dalam mengakses	Informasi atau aplikasi Perumahan bagi PNPP dan Masyarakat guna Informasi dan pelayanan yang mempermudah PNPP dalam mengakses aplikasi tersebut.

TABEL 11. GAMBARAN PERUBAHAN SEBELUM DAN SESUDAH PROYEK PERUBAHAN

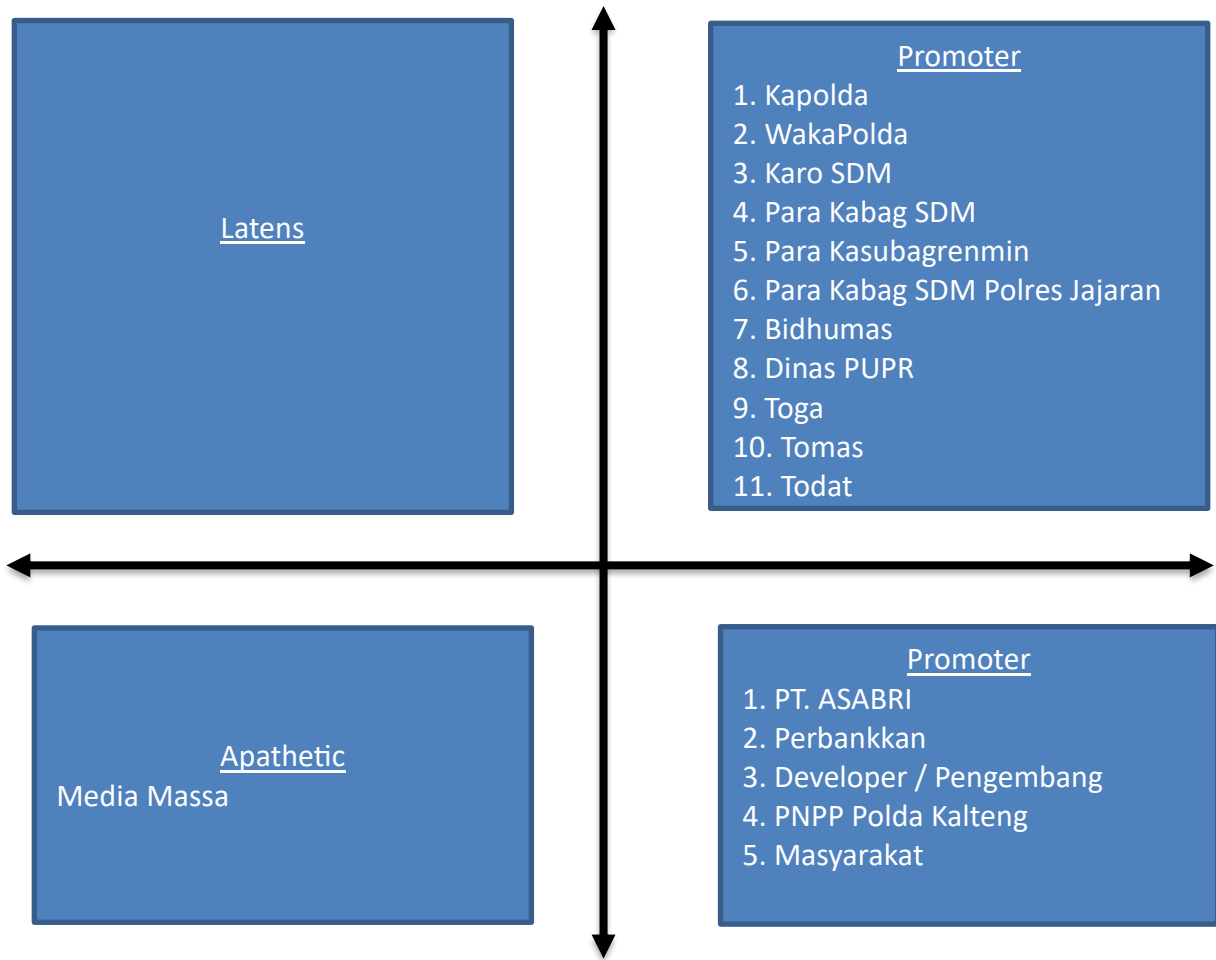
2. Perubahan Peta Kelompok Stakeholder

PETA STAKEHOLDERS



GAMBAR 51
PETA STAKE HOLDER SEBELUM ADANYA PROYEK PERUBAHAN

Setelah dibentuknya terobosan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Project Leader dan tim efektif untuk kegiatan Strategi Kepemilikan rumah bagi PNPP Polda Kalteng atau bijak Kapolda Kalteng berupa PKS Kepemilikan rumah bagi PNPP Polda Kalteng, Fakta Integritas bagi personil yang terlibat serta Surat Pernyataan Dukungan dengan PT. ASABRI Cab Palangka Raya, Bank BRI Cab. Palangka Raya, Bank BTN Cab. Palangka Raya, Pihak Pengembang PT. Kelvin Berkah Mandiri dan PT. Graha Asrawi Membangun Provinsi Kalimantan Tengah maka terjadi pergeseran Stakeholder sebagai berikut.



GAMBAR 52
PERUBAHAN STAKEHOLDER SETELAH ADANYA PROYEK PERUBAHAN

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dengan mengambil suatu ringkasan, mengikuti kerangka pemikiran yang dikembangkan bahwa :

1. Program Kapolri untuk pemenuhan PNPP dengan target 100.000 rumah yang merupakan bagian dari program 100 hari Kapolri menunjukkan bahwa tekat Kapolri untuk memenuhi kesejahteraan anggota/PNPP melalui perumahan harus mendapat atensi dari semua Kasatker dari seluruh jajaran Polri.
2. Pengadaan perumahan pemilik pribadi bagi PNPP dapat dilakukan melalui dua skema pilihan, pertama adalah melalui KPR non-subsidi dan kedua KPR FLPP bersubsidi. Pihak perbankan dalam memfasilitasi perumahan untuk PNPP menyatakan telah siap dengan berbagai skema pilihan termasuk skema pembiayaan khusus untuk PNPP (BRI dan BTN).

b. Rekomendasi

1. Kapolri melalui As SDM Kapolri perlu bersurat pada dirjen Pembiayaan Kemen PUPR agar batas Minimal income PNPP yang dapat mengambil KPR FLPP bersubsidi untuk dinaikkan menjadi 8 juta rupiah dan 10 juta rupiah untuk mereka yang sudah berkeluarga (double income).
2. Dimensi kepemimpinan Satker dalam mendinamisasi dan memotivasi serta memfasilitasi PNPP agar mempunyai rumah pribadi sebagai tempat tinggal atau investasi perlu di tingkatkan.

c. *Lesson Learned*

Pengalaman yang didapatkan selama memimpin proyek perubahan Strategi Kepemilikan Rumah Bagi PNPP Polda Klateng selama 60 hari (sampai dengan tanggal 30 November 2024) adalah:

- a. Kepemimpinan yang adaptif, sehingga sebagai *project leader* harus kebal dan tangguh menghadapi berbagai macam saran masukan dan juga pola pandang berbeda yang harus di olah menjadi satu;
- b. Tim efektif yang kuat dan bersinergi dalam pengerjaan proyek perubahan ditengah mengemban tugas tanggung jawab yang sangat padat;
- c. *Time management* penuh tantangan, karena dalam rangka OMB Pilkada Serentak yang dilakukan diakhir tahun 2024 serta operasi Kepolisian harian yang harus dilakukan, banyaknya persiapan rencana operasi Kepolisian yang disiapkan dan di koordinasikan menjelang akhir tahun, sehingga memaksimalkan waktu yang ada dalam mengerjakan Proyek Perubahan beserta Tim Efektif bersama-sama dalam membagi tugas yang sangat padat tersebut;
- d. Komunikasi baik secara formal dan informal dengan berbagai pihak yang mendukung proyek perubahan Kepemilikan Rumah bagi PNPP Polda Kalteng dan dukungan dari semua pihak dalam proses kemajuan bersama;
- e. Dengan adanya proyek perubahan pada Bag Watpers Biro SDM Polda Kalteng diharapkan dapat memajukan Polri sebagai organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencabutan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman uang muka kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batsan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Agustriana, Diah, (2018), Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan), repository.unej.ac.id.

<https://finance.detik.com/properti/d-6181027/boom-harga-rumah-bakal-makin-mahal-2023>.

Nurrahman, Jaya (2020), Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Hunian yang Layak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, repository.unej.ac.id.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS

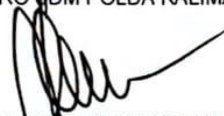
Nomor: B/ND- 1163 /XI/HUK.8.1.1./2024/Ro SDM

Kepada : Yth. Kapolda Kalteng
Dari : Karo SDM Polda Kalteng
Hal : permohonan tanda tangan

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Rencana Kerja Biro SDM Polda Kalteng T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan perumahan subsidi bagi personel Polda Kalteng merupakan bagian pemenuhan hak-hak personel yang dapat dilakukan melalui kerja sama antara Polda Kalteng dengan pihak perbankan dan pengembang yang ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama dimaksud.
3. Berkaitan dengan poin 2 (dua) di atas, bersama ini diajukan kepada Ka. permohonan penandatanganan surat perintah Kapolda Kalteng (sebagaimana terlampir) kepada Kepala Biro SDM Polda Kalteng atas nama Polda Kalteng guna melakukan penandatanganan perpanjangan kerja sama dengan pihak perbankan dalam hal ini Bank BTN (Persero) Cabang Palangka Raya, Bank BRI Cabang Palangka Raya dan pihak pengembang PT Graha Aswari Membangun dan PT Kelvin Berkah Mandiri.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 8 November 2024

KEPALA BIRO SDM POLDA KALIMANTAN TENGAH



LEO S.N. SIMATUPANG, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070770

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ **1095** /XI/HUK.8.1.1./2024

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama bantuan pembiayaan dan pembangunan perumahan subsidi bagi personel Polda Kalteng, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Rencana Kerja Biro SDM Polda Kalteng T.A. 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : KOMBES POL LEO S. N. SIMATUPANG, S.I.K. NRP 74070770
KARO SDM POLDA KALTENG

- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pembiayaan dan Pembangunan Perumahan Subsidi bagi personel Polda Kalteng dengan Bank BTN (Persero) Cabang Palangka Raya, Bank BRI Cabang Palangka Raya, PT Graha Aswari Membangun dan PT Kelvin Berkah Mandiri Palangka Raya;
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda Kalteng;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Palangka Raya

pada tanggal : **29** November 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH



Drs. DUKKO POERWANTO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Wakapolda Kalteng.
2. Irwasda Polda Kalteng.
3. Karoops Polda Kalteng.
4. Kabidpropam Polda Kalteng.
5. Kabidkum Polda Kalteng.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG PALANGKA RAYA
PT KELVIN BERKAH MANDIRI (Persero) Tbk KANTOR CABANG PALANGKA RAYA**

Nomor : PKS / _____ /XI/2024

Nomor : B.6628-KC-X/CONS/XI/2024

Nomor : PKS/ _____ /XI/2024

**TENTANG
PENGADAAN RUMAH PROGRAM KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA
POLRI POLDA KALTENG**

Pada hari ini, Rabu tanggal 6 (Enam) bulan November tahun 2024, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan bawah ini :

1. **KOMISARIS BESAR POLISI** Selaku Kepala Biro Karo Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1192/VII/2024 tgl 26 Juli 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
LEO S. N. SIMATUPANG
S.I.K.

2. **SARI WAHONO** Selaku *Branch Office Head* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No 07 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	----------	-----------

dan atas nama

dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang saat ini berkedudukan di Palangka Raya, Jalan Jend A. Yani No. 85, Palangka Raya Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. HJ. IMAS SUMINAR

Selaku Direktur Utama PT Kelvin Berkah Mandiri sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor AHU 0048645.AH.01.01 TAHUN 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kelvin Berkah Mandiri yang berkedudukan di Kota Palangkaraya, dan selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut ;

- a. bahwa Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah adalah pelaksana tugas Kepolisian yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa BANK BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan, meliputi pendanaan, kredit/pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya, yang menyediakan fasilitas KPR yang mempunyai kemitraan dengan PENGEMBANG;
- c. bahwa PT Kelvin Berkah Mandiri merupakan *developer*/pengembang perumahan yang berkeinginan untuk bekerjasama dengan BANK BRI dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
- d. bahwa antara BANK BRI dan PT. Kelvin Berkah Mandiri telah menandatangani Perjanjian kerja sama Nomor 585/PKR.III/MCLU/XI/2016.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	---------------------	-----------

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja sama tentang Pengadaan Rumah Program Khusus bagi Para Anggota/PNS Polri Polda Kalimantan Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** membutuhkan rumah hunian/tempat tinggal bagi PPNP Polri Polda Kalimantan Tengah;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai syarat dan ketentuan berlaku;
- (3) **PIHAK KETIGA** menyediakan rumah hunian/tempat tinggal untuk **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi rumah sudah siap huni.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	---------------------	-----------

(1) Maksud

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengadaan Rumah Program Khusus bagi Para Anggota/PNS Polri Polda Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dan mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** guna mendukung terpenuhinya kebutuhan rumah program khusus bagi anggota/PNS Polri di Lingkungan Polda Kalimantan Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi;

- a. Fasilitas Pembiayaan/KPR dan uang muka;
- b. Lokasi, Spesifikasi dan harga jual rumah;
- c. Ketentuan dan syarat Pemilikan Rumah bagi anggota/PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Tengah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Pembiayaan/KPR dan Uang Muka

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas pembiayaan KPR sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk fasilitas pembiayaan/KPR ditetapkan berdasarkan besaran uang muka;
- (3) Besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu minimal uang muka 1% dari harga jual untuk KPR Subsidi, dan minimal uang muka 10% dari harga jual untuk KPR Non Subsidi;

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	----------	-----------

(4) Setiap

- (4) Setiap Anggota/PNS Polri Polda Kalimantan Tengah dari **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas biaya Akta Jual Beli (AJB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Biaya proses KPR sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku;
- (5) Para calon debitur dalam hal ini anggota/PNS Polri Polda Kalimantan Tengah wajib menyetorkan biaya akad KPR pada Rekening Tabungan yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** ;
- (6) Pembayaran fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan melalui pemotongan gaji Anggota/PNS Polri di lingkungan Polda Kalimantan Tengah;
- (7) **PIHAK KETIGA** bertanggung jawab atas penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas lingkungan perumahan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan/KPR

Pasal 5

PARA PIHAK bersama-sama akan melakukan pembinaan dan penyelesaian pembiayaan KPR terhadap pembiayaan yang bermasalah, dengan langkah-langkah:

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia membantu melakukan pembinaan terhadap debitur untuk menyelesaikan tunggakan;
- (2) **PIHAK KETIGA** selaku pengembang bersedia melakukan *BUY BACK* atau membeli kembali terhadap rumah yang dibiayai dengan uang muka minimal 1% selama 3 tahun sejak akad kredit apabila KPR masuk dalam kategori *Non Performing Loan* (NPL);
- (3) Untuk pembinaan dan penyelamatan pembiayaan, **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan:
 - a. Restrukturisasi yaitu Penjadwalan Ulang;
 - b. Novasi/alih debitur;
 - c. Subrograsi dan Cassie;
 - d. Lelang Agunan;
- (4) Penyelesaian pembiayaan KPR melalui eksekusi agunan/Lelang, setelah upaya-upaya pembinaan termasuk upaya restrukturisasi kepada debitur tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	----------	-----------

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Lokasi, Spesifikasi & Harga Jual Rumah

Pasal 6

- (1) **PIHAK KETIGA** menyiapkan Perumahan Casadova berlokasi di Jalan G.Obos XVI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya. dan di Jalan Mahir Mahar Lama/Kangkari, Kelurahan Bukit Tunggul, Jalan Letkol E Toëwak Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Jalan Haka 28 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Serta Jalan Bandara Utama Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Perumahan yang dibangun oleh **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi rumah sesuai tabel berikut:

No	Item		Spesifikasi
1.	Pondasi	:	Cakar Ayam Beton Bertulang
2.	Dinding	:	Batako Plesteran dan Aci Luar Dalam dan Cat
3.	Lantai Teras dan WC	:	Keramik
4.	Plafon	:	Nusa Board
5.	Kusen, Panel Pintu dan Jendela	:	Kayu Pilihan
6.	Cat Dinding (Luar dan Dalam)	:	Cendana (Mowilex)
6.	Rangka Atap	:	Kayu Pilihan
7.	Atap	:	A Plus
8.	Listrik	:	900 Watt
9.	Sumber air	:	Sumur Bor

- (3) Dalam hal harga jual rumah KPR Subsidi dibangun rumah Tipe 36 dengan luas tanah dan harga jual sebesar maksimal sesuai dengan ketentuan KPR Subsidi yang berlaku, sedangkan harga jual untuk KPR Non Subsidi ditentukan oleh **PIHAK KETIGA**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	---------------------	-----------

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 9

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan lebih lanjut dalam amandemen perjanjian;
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki perubahan atau pengakhiran atas perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka **PIHAK** yang menginginkan perubahan atau pengakhiran dimaksud harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	----------	-----------

BAB VIII
JAMINAN KEWENANGAN
Pasal 10

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan menjalankan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian in

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 13

- (1) Apabila terjadi Keadaan Memaksa yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini seperti peperangan, huru hara, blokade, bencana alam, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan atau kegoncangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang terkena/berada dalam Keadaan Memaksa wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini karena Keadaan Memaksa, maka **PIHAK** lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut sampai kejadian Keadaan Memaksa tersebut berakhir.
- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan tidak bisa diatasi, maka Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	---------------------	-----------

BAB X

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Addendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 15

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA


LEO S.N. SIMATUPANG, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070770


SARI WAHONO
BRANCH OFFICE HEAD




H. MAS SUMINAR
DIREKTUR UTAMA



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRJEN POL Drs. DJOKO POERWANTO

Jabatan : KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH

Instansi/ Perusahaan : POLRI POLDA KALIMANTAN TENGAH

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan proyek perubahan "**Strategi Kepemilikan Rumah Bagi PNPP Polda Kalimantan Tengah**" yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2024, sebagai berikut:

Nama : AKBP ZAINUDDIN, S.Pd., S.E., M.Si.

Jabatan : KABAGWATPERS RO SDM POLDA KALTENG

NDH : 20240707012303

Instansi : Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Palangka Raya, 26 November 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH



Drs. DJOKO POERWANTO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

